



**LAPORAN PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN ASISTENSI
PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH BIDANG
SUMBER DAYA ALAM
TAHUN 2024**

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Karunia-Nya, penyusunan buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2024 dapat diselesaikan penyusunannya. Pelaksanaan Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2024 dilaksanakan untuk asistensi dan verifikasi dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup bidang Sumber Daya Alam, sehingga dokumen-dokumen tersebut sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya juga dilakukan verifikasi usulan dana DAK Fisik Kabupaten/Kota Tahun 2024 lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sumatera Barat wajib untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerahnya.

Dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah lingkup Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2025 dan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah lingkup Bidang Sumber Daya Alam tahun 2024 yang diverifikasi adalah :

1. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Dinas Pangan
4. Dinas Kelautan dan Perikanan
5. Dinas Kehutanan

Usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota Tahun 2025 lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang diverifikasi adalah :

1. Kabupaten Pasaman Barat
2. Kabupaten Solok
3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Kabupaten Padang Pariaman

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku laporan Sub kegiatan ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, Desember 2024
KEPALA BIDANG EKONOMI
DAN SUMBER DAYA ALAM



Ir. BENNY SAKTI, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19670927 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	4
	1.3 Tujuan	6
	1.4 Lingkup Kegiatan	6
	1.5 Hasil Kegiatan	6
BAB II	: VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBUNGAN PERANGKAT DAERAH	8
	2.1 Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	8
	2.1.1 Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	10
	2.1.2 Dinas Peternakan dan Kesehatan Heran	11
	2.1.3 Dinas Pangan	12
	2.1.4 Dinas Kelautan dan Perikanan	13
	2.1.5 Dinas Kehutanan	14
	2.1 Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	15
	2.1.1 Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	15
	2.1.2 Dinas Peternakan dan Kesehatan Heran	16
	2.1.3 Dinas Pangan	17
	2.1.4 Dinas Kelautan dan Perikanan	18
	2.1.5 Dinas Kehutanan	19
BAB III	: VERIFIKASI USULAN DAK KABUPATEN /KOTA TAHUN 2025	20
BAB IV	: PENUTUP	24

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah harus sinkron dan harmonis antara pemerintah kab/kota, pemerintah provinsi dan juga dengan pemerintah pusat. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan arah kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan yang direncanakan di kabupaten/kota maupun provinsi harus mendukung program kegiatan nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar secara nasional tujuan pembangunan yang sudah direncanakan dapat tercapai tepat sasaran. Oleh karena itu perlu dilakukan asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah untuk menyamakan persepsi dan mengidentifikasi program kegiatan agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Program dan kegiatan OPD Provinsi yang akan disusun menjadi dokumen perencanaan perangkat daerah saat ini harus mengacu pada program dan kegiatan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pemerintah pusat menerbitkan permendagri tersebut yang berfungsi untuk penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah agar seragam di semua pemerintah daerah baik level provinsi maupun level kabupaten/kota. Permendagri no 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah merupakan peraturan turunan dari Undang-undang No 23 tahun 2014.

Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dokumen dengan menggunakan Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan :

- a. Perencanaan pembangunan daerah;
- b. perencanaan anggaran daerah;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- d. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. pertanggungjawaban keuangan daerah;
- f. pengawasan keuangan daerah; dan
- g. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya

Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur dimaksud dalam permengari no 90 tahun 2019 disusun berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terdiri atas:

- a. Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber Pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. rekening.

Menyadari bahwa dinamika perkembangan akibat perubahan kebijakan maupun usulan daerah maka dibuka peluang dalam Permendagri 90 tahun 2019 untuk melakukan pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari tim teknis lintas komponen berdasarkan usulan pemerintahan daerah dan/atau perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan. Penambahan aktifitas berarti penambahan kode, untuk kebutuhan pembinaan maka kode untuk setiap aktifitas yang ditambah harus diseragamkan. Pemutakhiran dilakukan pada masa penyusunan RKKP dan APBD. Pada sedain awal Permendagri 90 pemutakhiran dilakukan 2 kali dalam setahun dimana pemutakhiran pertama untuk menampung penambahan di RKPD dan pemutakhiran kedua untuk menampung penambahan di APBD

Berdasarkan hasil pemutakhiran Permendagri No 90 Tahun 2019, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menetapkan nama program kegiatan beserta indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Proses pemutakhiran melalui kegiatan asistensi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah serta tim anggaran pendapatan daerah dalam merumuskan program kegiatan agar sejalan dan selaras dengan pemerintah pusat dan tujuan permendagri no 90 tahun 2019.

Demikian halnya dengan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam di Provinsi Sumatera Barat harus mengacu pada Permendagri No 90 Tahun 2019. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Sumber Daya Alam di Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait.

Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan asistensi kepada OPD Provinsi untuk menyusun urusan, bidang urusan, program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan daerah serta selaras dengan Permendagri No 90 Tahun 2019. Asistensi ini dilakukan pada semua OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengawal OPD agar tidak salah dalam menyusun RKPD, Renstra dan Renja masing-masing OPD. Kesalahan OPD dalam menyusun RKPD dapat mengakibatkan tidak berjalannya program kegiatan yang direncanakan sehingga akan berpengaruh pada jalannya pemerintahan provinsi secara keseluruhan.

Selain melakukan asistensi kepada OPD Provinsi dibidang perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Sumber Daya Alam, kegiatan asistensi juga dilakukan terhadap usulan Dana Alokasi Khusus (DAK). Asistensi DAK dilakukan tidak hanya kepada pemerintah Provinsi tapi juga seluruh DAK Kabupaten/Kota yang terkait dengan urusan bidang Sumber Daya Alam. Secara prinsip asistensi DAK dilakukan sama halnya dengan asistensi dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah, yakni harus selaras dan sejalan dengan pedoman dan pilihan DAK yang ditetapkan pemerintah pusat. Dalam melakukan asistensi DAK, Bappeda provinsi bertugas mengawal keselarasan usulan DAK sesuai kebutuhan daerah dan program pemerintah pusat serta

menetapkan skala prioritas terhadap usulan DAK yang akan diajukan ke pemerintah pusat.

1.2. **DASAR HUKUM**

Dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2024, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
12. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.
13. Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/04/I/SET/Bappeda-2023 tanggal 3 Januari 2024, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2024, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya

Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

1. 3. **TUJUAN**

Penyusunan laporan sub kegiatan Asistensi Penyusunan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam tahun 2024 bertujuan:

1. Terlaksananya tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Mengetahui konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah
3. Mengetahui kesesuaian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat

1. 4. **LINGKUP KEGIATAN**

1. Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah lingkup Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2025 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah lingkup Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2024
2. Verifikasi usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota tahun 2025

1. 5. **HASIL KEGIATAN**

Hasil akhir yang diharapkan dari Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam adalah :

1. Terlaksananya kegiatan asistensi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Sumber Daya Alam yang sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.
2. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Sumber Daya Alam yang sesuai dengan regulasi yang berlaku melalui mekanisme yang ditetapkan.
3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam

4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Sumber Daya Alam dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor Sumber Daya Alam.

BAB II
VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2025

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, perlu memperhatikan :

- a. Sesuai pasal 85 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Provinsi berdasarkan Rancangan Awal Renja seluruh Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal RKP dan Program Strategis Nasional.
- b. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 oleh Tim Verifikasi Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang terdiri dari Bappeda, BPKAD, Biro Organisasi dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.
- c. Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Surat undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 00.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 perihal undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

Dasar pelaksanaan verifikasi rancangan Rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025 adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4003/Bangda Tanggal 14 September 2021, Dirjen Bina Bangda selaku Ketua Pokja pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah telah menyampaikan rancangan pemutakhiran perencanaan pembangunan daerah untuk dikompilasi bersama-sama dengan urusan lain untuk dilakukan pemutakhiran
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 00.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi :

1. Sesuai Pasal 126 ayat (1) Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 paling lambat minggu pertama bulan Desember Tahun 2023.
2. Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dilakukan dengan tahapan sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :
 - a. Persiapan Penyusunan, meliputi kegiatan :
 1. Penyusunan dan penetapan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah.
 2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah.

3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah.
 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.
 5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 pada Triwulan III dan IV.
- b. Rancangan Awal disusun berdasarkan Renstra Perangkat daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
 - c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan Tahun 2025 dengan rencana pengadaan mengutamakan pemakaian Produk Dalam Negeri.
3. Pagu pada masing-masing Urusan dan Program dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

2.1.1. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Pertanian.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat
2. Hasil verifikasi rancangan Renja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2025 dapat dilihat pada matrik dan notulen rapat hasil verifikasi sebagaimana terlampir.



BERITA ACARA
PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nomor : 37/V/Eko-SDA/Bappeda-2024

Dasar pelaksanaan kegiatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tanggal 23 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

Pelaksanaan Kegiatan :

Hari / Tanggal : Kamis / 16 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Objek Verifikasi :

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) **Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025**
2. Melaksanakan Urusan/Fungsi **Pemerintahan Bidang Pertanian**

Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025:

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Perangkat Daerah **telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah** sebagaimana daftar hadir pada **lampiran 1 Berita Acara ini.**
2. **Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani** terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-

- 2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Tim Verifikasi menyepakati hasil verifikasi dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
 4. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah memprioritaskan pencapaian SPM sesuai dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 5. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah mengakomodir Usulan Pra-Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
 6. Kesepakatan terkait RPJMD, Pemenuhan SPM dengan kategori sbb:
 - Tersedianya Program Unggulan sesuai SK Gubernur
 - Tersedianya Sub Kegiatan yang mengakomodir Pemenuhan Target SPM
 - Sudah mengakomodir Usulan program Prioritas sesuai usulan dari DPRD
 - Tersedianya Sub Kegiatan yang mendorong Mandatori dan Sinergitas Pusat dan Daerah
 - Tersedianya Sub Kegiatan yang menampung DAK Fisik Tahun 2025
 7. Selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2025 agar masing-masing Perangkat Daerah mempedomani Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal : Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024 : **Merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan *earmark* prioritas penganggaran;**
 8. Memastikan beberapa sub kegiatan untuk direncanakan dan dianggarkan pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan target yang akan dicapai, antara lain yakni :
 - a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2025;
 - b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2025 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil musrenbang);
 - c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil verifikasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1 : DAFTAR HADIR

TIM VERIFIKASI			
NO	NAMA	SKPD	TANDATANGAN
1	Conara Nadisman	BPKAD	1.
2	AFKUMADONI	BPKAD	2.
3	Fahriani	BPKAD	3.
4	Wijah Viryanati	Inspetent	4.
5	Desy Herawati	Ro Organisasi	5.
6	Hendriah K	Bappeda	6.
7	Steffi Amanda	Bappeda	7.
8	Devyanb	Bappeda	8.
9	Rosalinda	Bappeda	9.
10.	Benny S	Bappeda	10.
PERANGKAT DAERAH YANG DIBAHAS :			
No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1			1.
2	Rezky Hidayat	Kabid Hortikultura	2.
3	Wenny Dk	DTM	3.
4	Agri Yoga Riwalq	PL	4.
5	Dedek Sri Aulia	Tan. Pansca	5.
6	Rina Martin	UPTD BBT	6.
7	Yefi Fitriani	Ka. UPTD BSB	7.
8	Afnelly	Ka. UPTD BTPH.	8.
9	Syofwanan	ka UPTD Bmptp	9.
10			10.

LAMPIRAN VERIFIKASI RANCANGAN RENJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Tagging															Keterangan	
					Mendukung PN	Progul	SPM	Stunting	Kemiskin an	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	Mendukung IKU	Mendukun g IKD	Penunjang Urusan Pem	IPP	Mendukun g Disabilitas	Mendukung Program SAKIP		
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	184.212.062.550	0	184.212.062.550																	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	184.212.062.550	0	184.212.062.550																	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.196.173.550	0	66.196.173.550																	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	800.000.000	0	800.000.000																	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	0	300.000.000			V						V	V	V				V		Perjalanan Dinas 147.620.000 BBM/Pelumas 8.457.500 (pindah ke rapat koordinasi) Forum OPD di Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000.000	0	500.000.000			V						V	V	V				V		Perjalanan Dinas 298.620.000 BBM/Pelumas 11.329.000 (pindah ke rapat koordinasi)
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.674.282.898	0	49.674.282.898																	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48.624.282.898	0	48.624.282.898			V						V	V	V				V		Belum ada rincian gaji dan tunjangan Pertimbangan gaji 13 dan 14 100%
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	900.000.000	0	900.000.000			V						V	V	V				V		Pindah ke Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah berlaku untuk seluruh pengguna sub kegiatan ini
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	150.000.000	0	150.000.000			V						V	V	V				V		Perjalanan Dinas pindah ke rapat koordinasi
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	710.000.000	0	710.000.000																	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	210.000.000	0	210.000.000			V						V	V	V				V		Dirinci sesuai kebutuhan untuk SKPD Penyesuaian indikator 1 dokumen seluruh UPTD UPTP Mekanisasi sesuaikan kebutuhan

3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	400.000.000	0	400.000.000			V						V	V	V			V	Penyesuaian Indikator menjadi 1 laporan Alokasikan anggaran untuk proses sertifikasi Belanja perjalanan dinas tidak terkait pengawasan aset dipindahkan
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	0	100.000.000			V						V	V	V			V	Penyesuaian rincian belanja
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	200.000.000	0	200.000.000															
3.27.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	100.000.000	0	100.000.000			V						V	V	V			V	Penyesuaian rincian belanja
3.27.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	100.000.000	0	100.000.000			V						V	V	V			V	Penyesuaian rincian belanja
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	633.000.000	0	633.000.000															
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	633.000.000	0	633.000.000			V						V	V	V			V	Penyesuaian Indikator Penyesuaian rincian belanja dengan jumlah pegawai
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.006.713.028	0	4.006.713.028															
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000	0	80.000.000			V						V	V	V			V	Penyesuaian indikator dan penyesuaian rincian belanja sesuai kebutuhan
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800.000.000	0	800.000.000			V						V	V	V			V	Penyesuaian Indikator Penyesuaian Sub Kegiatan terhadap rincian belanja
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	800.000.000	0	800.000.000			V						V	V	V			V	Penyesuaian Indikator Penyesuaian sub kegiatan terhadap rincian belanja
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.000.600	0	400.000.600			V						V	V	V			V	Penyesuaian indikator dan rincian belanja
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	0	200.000.000			V						V	V	V			V	Penyesuaian Indikator dan rincian belanja
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	0	50.000.000			V						V	V	V			V	Penyesuaian indikator dan penyesuaian rincian belanja dengan sub kegiatan
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.676.712.428	0	1.676.712.428			V						V	V	V			V	Penyesuaian indikator dan penyesuaian rincian belanja dengan sub kegiatan
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.600.000.000	0	1.600.000.000															
3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	800.000.000	0	800.000.000			V						V	V	V			V	Penyesuaian indikator Penyesuaian rincian belanja dengan sub kegiatan
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	800.000.000	0	800.000.000			V						V	V	V			V	Penyesuaian indikator dan penyesuaian rincian belanja dengan sub kegiatan
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.566.527.874	0	7.566.527.874															
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.000.000	0	47.000.000			V						V	V	V			V	Penyesuaian indikator dan penyesuaian rincian belanja sesuai sub kegiatan

3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.516.964.728	0	1.516.964.728			V						V	V	V			V	Agar memenuhi kebutuhan air, listrik, internet dan telepon 12 bulan
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	0	80.000.000															
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.922.563.146	0	5.922.563.146			V						V	V	V			V	Penyesuaian indikator 1 paoran per tahun dan rincian belanja sesuai kebutuhan
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.005.649.750	0	1.005.649.750															
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	630.649.750	0	630.649.750			V						V	V	V			V	Penyesuaian indikator dan rincian belanja
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	225.000.000	0	225.000.000			V						V	V	V			V	Penyesuaian indikator dan perincian belanja
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	0	150.000.000			V						V	V	V			V	Penyesuaian rincin belanja
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	45.158.898.000	0	45.158.898.000															
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	10.300.000.000	0	10.300.000.000															
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3.300.000.000	0	3.300.000.000	V	V	V		V				V	V	V			V	Penyesuaian sub kegiatan terhadap rincian belanja
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	300.000.000	0	300.000.000	V									V				V	tidak ada catatan
3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	3.200.000.000	0	3.200.000.000			V	V				V	V	V				V	Kendaraan Operasional ditunda, BBM dan perjalanan dinas di efesiesidan rasionalisasi Penyesuaian subkegiatan peralatan komputer
3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	2.000.000.000	0	2.000.000.000			V	V				V	V	V				V	Perincian belanja
3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	1.500.000.000	0	1.500.000.000			V	V				V	V	V				V	Penyesuaian rincian belanja
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	34.858.898.000	0	34.858.898.000															
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	4.000.000.000	0	4.000.000.000	V	V							V	V				V	Penyesuaian indikator Penyesuaian sub kegiatan dengan rincian belanja
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	30.858.898.000	0	30.858.898.000	V	V						V	V	V				V	Penyesuaian rincian belanja sesuai sub kegiatan Rasionalisasi belanja perjalanan dinas
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	45.889.519.000	0	45.889.519.000															
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	45.889.519.000	0	45.889.519.000															
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	31.289.519.000	0	31.289.519.000	V							V	V	V				V	Rasionalisasi belanja perjalanan dinas
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	3.000.000.000	0	3.000.000.000								V	V	V				V	Penyesuaian belanja fisik JUT menunggu SAB

3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	5.000.000.000	0	5.000.000.000	V	V					V		V	V	V			V	Penyesuaian belanja fisik JIUT menunggu SAB
3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	2.500.000.000	0	2.500.000.000									V	V				V	Penyesuaian kembali rincian belanja Rasionalisasi belanja perjalanan dinas Kendaraan bengkel keliling pindah ke Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	800.000.000	0	800.000.000	V								V	V				V	Penyesuaian rincian belanja dengan sub kegiatan Rasionalisasi rincian belanja
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana <u>Pendukungnya</u>	1.800.000.000	0	1.800.000.000									V	V				V	Penyesuaian rincian belanja
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	1.500.000.000	0	1.500.000.000	V								V	V				V	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.966.503.000	0	2.966.503.000															
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	2.966.503.000	0	2.966.503.000															
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan <u>Perkebunan</u>	1.100.000.000	0	1.100.000.000	V	V							V	V				V	Penyesuaian rincian belanja
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan <u>Perkebunan</u>	600.000.000	0	600.000.000	V								V	V				V	Penyesuaian rincian belanja
3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan <u>Perkebunan</u>	450.000.000	0	450.000.000									V	V				V	Tidak ada catatan
3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan <u>Perkebunan</u>	816.503.000	0	816.503.000	V	V							V	V				V	Penyesuaian rincian belanja
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	284.148.000	0	284.148.000															
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	284.148.000	0	284.148.000															
3.27.06.1.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	84.148.000	0	84.148.000									V	V				V	Pindah belanja rapat koordinasi
3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	100.000.000	0	100.000.000									V	V				V	Perincian belanja kegiatan
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	100.000.000	0	100.000.000									V	V				V	Perincian belanja kegiatan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	23.716.821.000	0	23.716.821.000															
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	6.150.000.000	0	6.150.000.000															
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	2.500.000.000	0	2.500.000.000									V	V				V	Penyesuaian Indikator lembaga dan rincian belanja kegiatan
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	3.650.000.000	0	3.650.000.000									V	V				V	Penyesuaian rincian belanja

3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	13.566.821.000	0	13.566.821.000																
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2.400.000.000	0	2.400.000.000									V	V					V	Penyesuaian rincian belanja terhadap sub kegiatan
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	11.166.821.000	0	11.166.821.000		V							V		V				V	Penyesuaian indikator dan perincian belanja pada sub kegiatan
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	4.000.000.000	0	4.000.000.000																
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	2.000.000.000	0	2.000.000.000									V	V					V	Penyesuaian perincian belanja kegiatan
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	2.000.000.000	0	2.000.000.000									V	V					V	Penyesuaian perincian belanja kegiatan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 0751.7056335 Fax.0751.7055676

NOTULEN RAPAT

Kepada : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Bidang EKO SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tanggal : 16 Mei 2024
Perihal : Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	:	kamis, 16 Mei 2024 Ruang Rapat Lt. I Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dasar	:	Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang EKOSDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	:	- Dinas Perkebunan - Fungsional dan Staf Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat - Inspektorat - BPKD - Biro Organisasi - Biro PBJ
Agenda Rapat	:	Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
Pembahasan Renja 2025	:	<p>Bappeda</p> <ul style="list-style-type: none">• Memastikan bahwa penyusunan program kegiatan indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat telah sesuai dgn target sasaran dan prioritas pembangunan daerah (indikator kinerja Utama dan indikator Kinerja daerah)• Tindak lanjut terhadap hasil reviu inspektorat terhadap laporan Kinerja Instansi pemerintah daerah Tahun 2023• Penyesuaian cascading pada masing-masing perangkat daerah• Rasionalisasi anggaran pada DPA tahun 2024• Memastikan penyusunan belanja pada masing-masing sub kegiatan telah sesuai dgn surat Gubernur Sumatera Barat nomor 030/237.a/BPKAD-pAP/2024 tanggal 4 april 2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja Tahun anggaran 2024• Tindaklanjut Hasil Evaluasi BPKP terhadap belanja sub kegiatan penanganan kemiskinan dan stunting pada APBD Tahun 2024 <p>Dinas Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Catatan : Perjalanan Dinas 147.620.000 BBM/Pelumas 8.457.500 (pindah ke rapat koordinasi) Forum OPD di Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Catatan : Perjalanan Dinas 298.620.000 BBM/Pelumas 11.329.000 (pindah ke rapat koordinasi) • Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Catatan : Belum ada rincian gaji dan tunjangan Pertimbangkan gaji 13 dan 14 100% • Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Catatan : Pindah ke Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah • Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Catatan : Perjalanan Dinas pindah ke rapat koordinasi • Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Catatan : Dirinci sesuai kebutuhan • Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Catatan : Penyesuaian Indikator • Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Catatan : Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Catatan : Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Catatan : Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Catatan : Penyesuaian Indikator Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Catatan : Penyesuaian Indikator • Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : Penyesuaian Sub Kegiatan ke Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Catatan : Penyesuaian Indikator Penyesuaian sub kegiatan terhadap rincian belanja • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : Penyesuaian indikator • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan : Penyesuaian Indikator • Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Catatan : Penyesuaian indikator dan penyesuaian rincian belanja dengan sub kegiatan • Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Catatan : Penyesuaian indikator dan penyesuaian rincian belanja dengan sub kegiatan • Kegiatan : Pengadaan Mebel Catatan : Penyesuaian indikator • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Penyesuaian indikator dan penyesuaian rincian belanja dengan sub kegiatan • Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Catatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : Penyesuaian Indikator dipelihara
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : Indikator 1 laporan per tahun • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : Penyesuaian indikator Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Peyesuaian indikator dan perincian belanja • Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Catatan : Penyesuaian indikator barang dipelihara Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan Catatan : Kendaraan Operasional ditunda, BBM dan perjalanan dinas di efesiensidan rasionalisasi Penyesuaian subkegiatan peralatan komputer • Kegiatan : Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura Catatan : Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Catatan : Rasionalisasi rincian belanja • Kegiatan : Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Catatan : Pindah belanja rapat koordinasi • Kegiatan : Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota Catatan : Perincian belanja kegiatan • Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Catatan : Perincian belanja kegiatan • Kegiatan : Pendampingan dan pengawalan korporasi petani Catatan : Penyesuaian perincian belanja kegiatan • Kegiatan : Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani Catatan : Penyesuaian perincian belanja kegiatan • Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Catatan : Penyesuaian belanja sesuai kebutuhan • Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Catatan : Penyesuaian indikator • Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Catatan : Penyesuaian Indikator Penyesuaian sub kegiatan terhadap rincian belanja • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : Penyesuaian indikator dan rincian belanja • Kegiatan : Penyesuaian indikator dan rincian belanja Catatan : Penyesuaian indikator • Kegiatan : Pengadaan Mebel Catatan : Penyesuaian indikator • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Penyesuaian indikator dan penyesuaian rincian belanja dengan sub kegiatan • Kegiatan : Penyesuaian indikator dan penyesuaian rincian belanja dengan sub kegiatan Catatan : Penyesuaian indikator dan penyesuaian rincian belanja dengan sub kegiatan
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : Penyesuaian Indikator dipelihara • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : penyesuaian indikator laporan 1 per tahun • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : Penyesuaian Indikator kendaraan dipelihara dan rincian belanja • Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Penyesuaian indikator barang dipelihara • Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian Catatan : Penyesuaian indikator dipelihara dan penyesuaian standar jasa konsultan • Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Catatan : Penyesuaian Indikator dan belanja • Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Catatan : Penyesuaian indikator dan rincian belanja sesuai kebutuhan • Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Catatan : Penyesuaian indikator • Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : Penyesuaian belanja pindah Sub Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : Penyesuaian Indikator • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan : Penyesuaian Indikator • Kegiatan : Pengadaan Mebel Catatan : Penyesuaian indikator Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Penyesuaian indikator dan rincian belanja untuk kendaraan roda 2 • Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Catatan : Penyesuaian indikator dan belanja • Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : Penyesuaian Indikator dipelihara • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : Penyesuaian indikator 1 laporan per tahun dan rincian belanja • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Catatan : Penyesuaian indikator dan rincian belanja • Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Catatan : Penyesuaian kembali rincian belanja • Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian Catatan : Penyesuaian rincian belanja untuk saja konsultansi • Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Catatan : Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Catatan : Penyesuaian indikator dan rincian belanja • Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Catatan : Penyesuaian Indikator Kebutuhan 20 paket • Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Catatan : Penyesuaian indikator Penyesuaian rincian belanja
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : Penyesuaian indikator Penyesuaian rincian belanja Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Catatan : Penyesuaian indikator Penyesuaian rincian belanja Sub Kegiatan Pengadaan mebel • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : Penyesuaian indikator • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan : Penyesuaian indikator dan rincian belanja • Kegiatan : Pengadaan Mebel Catatan : Penyesuaian indikator • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Penyesuaian sub kegiatan ke Penyediaan Peralatan rumah tangga • Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Catatan : Penyesuaian indikator dan belanja • Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : Penyesuaian Indikator dipelihara • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : Penyesuaian indikator 1 laporan per tahun dan perincian belanja • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Penyesuaian indikator barang dipelihara • Kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Catatan : Penyesuaian sub kegiatan dengan rincian belanja • Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Catatan : Rasionalisasi belanja perjalanan dinas • Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Catatan : Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Catatan : Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Catatan : Penyesuaian belanja dengan sub kegiatan • Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Catatan : Penyesuaian indikator • Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Catatan : Penyesuaian Indikator Jasa ukur tanah dialokasikan untuk proses sertifikat • Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Catatan : Penyesuaian Indikator Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Catatan : Penyesuaian Indikator Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : Penyesuaian indikator Pindah Sub Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya BBM Pindahkan • Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Catatan : Penyesuaian Indikator • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : Penyesuaian Indikator dan rincian belanja
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan : Penyesuaian Indikator dan rincian belanja • Kegiatan : Pengadaan Mebel Catatan : Penyesuaian Indikator dan rincian belanja • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Pindah sub kegiatan ke peralatan rumah tangga • Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Catatan : Penyesuaian indikator dan penyesuaian rincian belanja sesuai sub kegiatan • Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : Penyesuaian Indikator dipelihara • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : Penyesuaian indikator 1 laporan per tahun • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : Penyesuaian indikator dan rincian belanja • Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Penyesuaian indikator barang dipelihara dan rincian belanja • Kegiatan : Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Catatan : Rasionalisasi belanja perjalanan dinas • Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian Catatan : Penyesuaian indikator dan rincian belanja • Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Catatan : Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Catatan : Penyesuaian belanja perjalanan dinas • Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Catatan : Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Catatan : Penyesuaian belanja perjalanan dinas • Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Catatan : Penyesuaian rincian dengan kebutuhan • Kegiatan : Penyesuaian rincian dengan kebutuhan Catatan : Penyesuaian indikator dan rincian belanja • Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Catatan : Penyesuaian Indikator Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Catatan : Penyesuaian Indikator • Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : Penyesuaian Indikator pengadaan peralatan komputer ke Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Catatan : Penyesuaian Indikator • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan : Penyesuaian Indikator • Kegiatan : Pengadaan Mebel Catatan : Penyesuaian Indikator • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Penyesuaian indikator dan Belanja Pingpong dipindahkan utk belanja pada Subkegiatan lainnya • Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : Penyesuaian Indikator dipelihara
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : Penyesuaian indikator 1 paoran per tahun dan rincian belanja • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : Penyesuaian indikator dan rincian belanja • Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Penyesuaian indikator dipelihara • Kegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Catatan : Penyesuaian sub kegiatan terhadap rincian belanja • Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani Catatan : Penyesuaian belanja fisik JITUT menunggu SAB • Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Catatan : Penyesuaian belanja fisik JITUT menunggu SAB • Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian Catatan : Kendaraan bengkel keliling pindah ke Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Catatan : Penyesuaian rincian belanja dengan sub kegiatan • Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Catatan : Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Catatan : Penyesuaian pelaksanaan kegiatan ke Sub kegiatan koordinasi alsintan • Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Catatan : Penyesuaian indikator penyesuaian belanja ke sub lainnya • Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Catatan : Penyesuaian Indikator Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Catatan : Penyesuaian indikator • Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : Penyesuaian indikator Penyesuaian sub kegiatan untuk rincian belanja • Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Catatan : Penyesuaian Indikator • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : Penyesuaian Indikator • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan : Penyesuaian Indikator dan rincian belanja • Kegiatan : Pengadaan Mebel Catatan : Penyesuaian indikator dan rincian belanja • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Penyesuaian indikator dan penyesuaian sub kegiatan berdasarkan rincian belanja • Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Catatan : Penyesuaian indikator dan penyesuaian rincian belanja sesuai sub kegiatan • Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : Penyesuaian Indikator dipelihara
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : Penyesuaian indikator 1 paoran per tahun dan rincian belanja • Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Penyesuaian indikator dipelihara • Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Catatan : Penyesuaian rincin belanja • Kegiatan : Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian Catatan : Penyesuaian Indikator lembaga dan rincian belanja kegiatan • Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Catatan : Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Catatan : Penyesuaian rincian belanja terhadap sub kegiatan • Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Catatan : Penyesuaian rincian belanja
Perubahan 2024	:	1.
Dokumentasi	:	
Penutup	:	Demikian disampaikan, terima kasih.

Notulis,


Rosalinda

2.1.2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2025 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Pertanian.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat
2. Hasil verifikasi rancangan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025 dapat dilihat pada matrik dan notulen rapat hasil verifikasi sebagaimana terlampir.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

BERITA ACARA

PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nomor : 50 /V/Eko-SDA/Bappeda-2024

Dasar pelaksanaan kegiatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tanggal 23 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

Pelaksanaan Kegiatan :

Hari / Tanggal : Selasa / 28 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Objek Verifikasi :

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025**
2. Melaksanakan Urusan/Fungsi **Pemerintahan Bidang Pertanian**

Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025:

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Perangkat Daerah **telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah** sebagaimana daftar hadir pada **lampiran 1 Berita Acara ini.**
2. **Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani** terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-

- 2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Tim Verifikasi menyepakati hasil verifikasi dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
 4. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah memprioritaskan pencapaian SPM sesuai dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 5. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah mengakomodir Usulan Pra-Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
 6. Kesepakatan terkait RPJMD, Pemenuhan SPM dengan kategori sbb:
 - Tersedianya Program Unggulan sesuai SK Gubernur
 - Tersedianya Sub Kegiatan yang mengakomodir Pemenuhan Target SPM
 - Sudah mengakomodir Usulan program Prioritas sesuai usulan dari DPRD
 - Tersedianya Sub Kegiatan yang mendorong Mandatori dan Sinergitas Pusat dan Daerah
 - Tersedianya Sub Kegiatan yang menampung DAK Fisik Tahun 2025
 7. Selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2025 agar masing-masing Perangkat Daerah mempedomani Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal : Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024 : **Merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan *earmark* prioritas penganggaran;**
 8. Memastikan beberapa sub kegiatan untuk direncanakan dan dianggarkan pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan target yang akan dicapai, antara lain yakni :
 - a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2025;
 - b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2025 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil musrenbang);
 - c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil verifikasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1 : DAFTAR HADIR

TIM VERIFIKASI			
NO	NAMA	SKPD	TANDATANGAN
1	Devi Agustina	Biro Organisasi	1.
2	RAHMAT HASAYUN S	BPKAD	2.
3	Devi-rani	Bappeda	3.
4	Rosalinka	Bappeda	4.
5	Benny S	Bappeda	5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10.			10.
PERANGKAT DAERAH YANG DIBAHAS :			
No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Nirmala PD	Kabid Bina Usaha	1.
2	IDHAM FATMI	Ka. UPTD PSH Sumber	2.
3	Hermano	Ka. TU UPTD PMPP	3.
4	DEKMAN JAMAL	Ka. UPTD T. Rumini	4.
5	Afrizal Arman	Ka. UPTD KMA	5.
6			6.
7			7.
8	Refliker	Ka. UPTD.	8.
9			9.
10			10.

LAMPIRAN VERIFIKASI RANCANGAN RENJA TAHUN 2025
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Tagging														Keterangan			
					Menduku ng PN	Progul	SPM	Stunting	Kemiski nan	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	Mendukun g IKU	Mendukun g IKD	Penunjang Urusan Pem	IPP	Mendukung Disabilitas		Mendukung Program SAKIP		
3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	139.844.861.000	0	139.844.861.000																		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	139.844.861.000	0	139.844.861.000																		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.050.000.000	0	34.050.000.000																		
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.000.000	0	550.000.000																		
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	0	300.000.000																		anggaran untuk forum OPD dipindahkan ke sub kegiatan forum opd, efisiensi cetak dan penggandaan, belanja sewa hotel dialihkan ke sewa tempat, PD dan BBM pindah ke rakor
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000	0	100.000.000																		PD dan BBM pindah ke rakor
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	0	150.000.000																		efisiensi kertas dan penggandaan, PD koordinasi pindah ke rakor, efisiensi PD untuk monev, PD koordinasi pindah ke rakor
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.920.000.000	0	22.920.000.000																		
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.000.000.000	0	22.000.000.000																		pastikan sudah mengakomodir semua pegawai 14 x setahun
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800.000.000	0	800.000.000																		ok
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	120.000.000	0	120.000.000																		PD dan BBM pindah ke rakor
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300.000.000	0	300.000.000																		
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	0	100.000.000																		asuransi kendaraan dinas 1 unit terkode PBB?
3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	0	100.000.000																		PD dan BBM pindah rakor
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	0	100.000.000																		PD dan BBM pindah rakor
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000.000	0	500.000.000																		
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	300.000.000	0	300.000.000																		sesuaikan jumlah dengan target
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	0	200.000.000																		akomodir perpindahan anggaran pelatihan/bimtek dari UPTD, target disesuaikan

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Tagging														Keterangan		
					Menduku ng PN	Progul	SPM	Stunting	Kemiski nan	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	Mendukun g IKU	Mendukun g IKD	Penunjang Urusan Pem	IPP	Mendukung Disabilitas		Mendukung Program SAKIP	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.340.000.000	0	2.340.000.000																	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	0	20.000.000																	efisiensi sesuai kebutuhan
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.000.000	0	300.000.000																	"efisiensi sesuai kebutuhan, satuan mesin gerinda?, harus mempedomani Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD) yang berlaku" mesin potong rumput pindah ke peralatan rumah tangga (sesuaikan dengan DO)
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	760.000.000	0	760.000.000																	efisiensi sesuai kebutuhan
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	310.000.000	0	310.000.000																	efisiensi sesuai kebutuhan
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	0	50.000.000																	efisiensi sesuai kebutuhan
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900.000.000	0	900.000.000																	menampung perpindahan anggaran dari sub kegiatan lain, apakah tidak memakai rekening makan minum rapat?
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000.000	0	750.000.000																	
3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	200.000.000	0	200.000.000																	"efisiensi sesuai kebutuhan, harus mempedomani Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD) yang berlaku" menampung perpindahan pengadaan mebel dari UPTD
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000	0	250.000.000																	"efisiensi sesuai kebutuhan, harus mempedomani Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD) yang berlaku" mengakomodir perpindahan pengadaan peralatan dari UPTD
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	0	300.000.000																	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.830.000.000	0	4.830.000.000																	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.330.000.000	0	1.330.000.000																	efisiensi sesuai kebutuhan

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Tagging														Keterangan		
					Mendukung PN	Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	Mendukung IKU	Mendukung IKD	Penunjang Urusan Pem	IPP	Mendukung Disabilitas		Mendukung Program SAKIP	
3.27.06.1.02	Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	300.000.000	0	300.000.000																	
3.27.06.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	300.000.000	0	300.000.000																	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.200.000.000	0	2.200.000.000																	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	150.000.000	0	150.000.000																	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	150.000.000	0	150.000.000																	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.450.000.000	0	1.450.000.000																	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1.450.000.000	0	1.450.000.000																	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	600.000.000	0	600.000.000																	
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	100.000.000	0	100.000.000																	
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	500.000.000	0	500.000.000																	

Pembahas (Bappeda)

Perwakilan SKPD

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 0751.7056335 Fax.0751.7055676

NOTULEN RAPAT

Kepada : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Bidang EKO SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tanggal : 28 Mei 2024
Perihal : Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	:	Selasa 28 Mei 2024 Ruang Rapat Lt. I Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dasar	:	Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang EKOSDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	:	- Dinas peternakan - Fungsional dan Staf Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat - Inspektorat - BPKD - Biro Organisasi - Biro PBJ
Agenda Rapat	:	Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
Pembahasan Renja 2025	:	Bappeda <ul style="list-style-type: none">• Memastikan bahwa penyusunan program kegiatan indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat telah sesuai dgn target sasaran dan prioritas pembangunan daerah (indikator kinerja Utama dan indikator Kinerja daerah)• Tindak lanjut terhadap hasil reuiu inspektorat terhadap laporan Kinerja Instansi pemerintah daerah Tahun 2023• Penyesuaian cascading pada masing-masing perangkat daerah• Rasionalisasi anggaran pada DPA Ztahun 2024• Memastikan penyusunan belanja pada masing-masing sub kegiatan telah sesuai dgn surat Gubernur Sumatera Barat nomor 030/237.a/BPKAD-pAP/2024 tanggal 4 april 2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja Tahun anggaran 2024• Tindaklanjut Hasil Evaluasi BPKP terhadap belanja sub kegiatan penanganan kemiskinan dan stunting pada APBD Tahun 2024 Dinas Peternakan <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Catatan : anggaran untuk forum OPD dipindahkan ke sub kegiatan forum opd, efisiensi cetak dan penggandaan, belanja sewa hotel dialihkan ke sewa tempat, PD dan BBM pindah ke rakor• Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Catatan : PD dan BBM pindah ke rakor

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Catatan : dan penggandaan, PD koordinasi pindah ke rakor, efisiensi PD untuk monev • Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Catatan : pastikan sudah mengakomodir semua pegawai 14 x setahun • Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Catatan : OK • Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Catatan : PD dan BBM pindah ke rakor • Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Catatan : OK • Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Catatan : PD dan BBM pindah rakor • Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Catatan : PD dan BBM pindah rakor • Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Catatan : sesuaikan jumlah dengan target • Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Catatan : Akomodir dari UPTD, Target disesuaikan • Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Catatan : OK • Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : Mesin potong rumput pindah • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : ok • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan : ok • Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Catatan : ok • Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Catatan : menampung perpindahan anggaran dari sub kegiatan lain, • Kegiatan : Pengadaan Mebel Catatan : Perpindahan kegiatan • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Mengakomodir perpindahan
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Catatan : ok • Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Catatan : ok • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : jumlah dan koefisien disesuaikan • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : sesuaikan dengan jumlah kendaraan yang ada • Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : efisiensi sesuai kebutuhan • Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Catatan : Sewa hotel dialihkan ke Aula, Perjadin pindah ke Rakor • Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan Catatan : efisiensi ATK dan penggandaan, PD dan BBM pindah ke rakor • Kegiatan : Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Catatan : usulan musrenbang diakomodir • Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner Catatan : Target Jadi 30 Org, RKA diperbaiki dan dirinci lagi, Narsum dihilangkan. • Kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Catatan : ok • Kegiatan : Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan Catatan : rincian bbm diperbaiki, PD belum dimunculkan, efisiensi • Kegiatan : Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Catatan : Memuat dokumen kajian, perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian untuk sapi perah, perjadin dipindahkan ke rakor • Kegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan Catatan : ok • Kegiatan : Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Catatan : rincian belanja bahan untuk kegiatan kantor (rompi, sepatu, pakaian lapangan dll) untuk petugas lapangan, biaya kontribusi penyaji disesuaikan, belanja sewa hotel dihilangkan ganti dengan sewa aula , PD dan BBM koordinasi pindah ke rakor, kegiatan masuk IKU IKD
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis Catatan : kegiatan berbentuk FGD, kertas disesuaikan lagi, makan minum disesuaikan, Narasumber dirincikan dipaketkan, perjadin dipindahkan ke Rakor • Kegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Catatan : efisiensi kertas, rincian belanja perlengkapan kantor (rompi, sepatu, tas) untuk petugas lapangan volumenya disesuaikan, Goodie bag rakor PHMS?, honor jasa penyuluh disesuaikan, Sewa hotel rakor PD yang bersifat koordinasi pindah ke rakor • Kegiatan : Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM Catatan : Target capaian dan hasil dilengkpai, rincian RKA diperbaiki, Rapat2 dihilangkan ganti • Kegiatan : Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Catatan : belanja wearpack, sepatu?, goodie bag/tas sekolah?, belanja jasa tenaga lab sesuaikan, belanja sewa hotel sesuaikan PD koordinasi pindah ke rakor • Kegiatan : Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan Catatan : Rasionalkan pena, sewa hotel sesuaikan dengan lokasi • Kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Catatan : Sub kegiatan masih dipertimbangkan • Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya Catatan : ok • Kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Catatan : Sewa Hotel dialihkan ke aula, Standar SSH disesuaikan ke BPKAD • Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Catatan : ok • Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Catatan : RKA diperbaiki dan dirinci • Kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Catatan : Pakaian dihilangkan saja, eo untuk sumbar expo dihapus, • Kegiatan : Pendampingan dan pengawalan korporasi petani Catatan : Hilang, gabung ke sub kegiatan 0006 • Kegiatan : Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
--	---

	<p>Catatan : Gabung dengan kegiatan 0005, RKA disesuaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : efisiensi kertas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik untuk dipindahkan ke sub kegiatan belanja listrik Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan : ok, bbm dihilangkan • Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : target keluaran disesuaikan, agar mengacu ke DO yang berlaku • Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Catatan : target capaian dan hasil dilengkapi, jasa petugas peternakan?, PD koordinasi dan BBM pindah ke rakor, kegiatan ada pendukung progul, masuk IKU IKD. • Kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Catatan : belanja bahan bangunan dan konstruksi tidak sesuai dengan output, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor tetap kegiatan penyediaan perlengkapan kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pindah ke sub kegiatan penyediaan komponen listrik, belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pindah ke sub kegiatan penyediaan perlengkapan kantor, belanja pakaian lapangan utk petugas lapangan utk 16 org, Belanja Pipa PVC untuk Pengairan Kandang? Belanja Jasa Laboratorim dihilangkan, Belanja Pemeliharaan pindah ke pemeliharaan peralatan dan mesin, PD dan BBM yang bersifat koordinasi pindah ke rakor • Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Catatan : perjalanan dinas pindahkan ke Rakor, pembangunan gedung negara untuk pembuatan kandang baru belum ada DED, spesifikasi dilengkapi, penanganan jalan provinsi OK, DED Belum ada • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : efisiensi sesuai kebutuhan • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan : efisiensi sesuai kebutuhan • Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : efisiensi sesuai kebutuhan • Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Catatan : PD dan BBM pindah ke rakor, kegiatan masuk dalam IKU IKD • Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
--	--

	<p>Catatan : PD dan BBM pindah ke rakor, biaya pemeliharaan masih belum dirinci</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pindah ke sub kegiatan penyediaan komponen listrik, Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan dan Belanja Pakaian Kerja Lapangan untuk 13 orang THL, pengadaan pindah ke dinas, • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata tidak cocok di sini (pindah ke logistik, efisiensi sesuai kebutuhan) • Kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Catatan : belanja accu pindah ke komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (4.125.000), belanja sepatu lapangan dihilangkan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata diefisiensikan, belanja baju lapangan dihilangkan, Belanja bahan promosi dan doorprize kegiatan Livestock Expo dihilangkan, Belanja Gorden Kantor, selimut, spray pindah ke perlengkapan kantor, Belanja Pemeliharaan pindah ke sub kegiatan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, PD dan BBM pindah ke rakor, Belanja Modal laptop, tablet, showcase pindah ke pengadaan peralatan dan mesin lainnya, mebel pindah ke dinas, kegiatan ini ada kegiatan progul • Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Catatan : PD dan BBM pindah ke rakor, pembangunan gedung kantor sudah ada DED,sudah masuk perencanaan dan pengawasan • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : efisiensi sesuai kebutuhan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor pindah ke sub kegiatan pengadaan mebel, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pindah ke sub kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, baju kaos olahraga dihilangkan, pengadaan laptop pindah ke dinas mempertimbangkan RKBMD • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan : efisiensi sesuai kebutuhan • Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : penggandaan dihilangkan, efisiensi sesuai kebutuhan, belanja modal CCTV pindah ke pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Catatan : penggandaan dihilangkan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pindah ke sub kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, belanja internet OK utk penunjang transaksi pembayaran non tunai • Kegiatan : Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan Catatan : untuk kebutuhan operasional, dipindahkan ke sub kegiatan logistik
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Catatan : efisiensi kertas sesuai kebutuhan, penggandaan 4 lembar, penempatan penyediaan madu dipindahkan sub kegiatannya, perjalanan dinas , Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa harus mempedomani Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD) yang berlaku • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : OK • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Catatan : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata tidak cocok di sini (pindah ke logistik, efisiensi sesuai kebutuhan) • Kegiatan : Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan Catatan : PD koordinasi pindah ke rakor, Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa harus mempedomani Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD) yang berlaku • Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Catatan : Kantor-Alat Listrik pindah ke sub kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Souvenir dihilangkan plakat OK, belanja modal scanner, penghancur kertas pindah ke pengadaan peralatan mesin lainnya, belanja mebel ke pengadaan mebel, belanja modal lainnya pindah ke peralatan mesin yang ada di sub kegiatan dinas • Kegiatan : Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Catatan : belanja pemeliharaan pindah ke sub kegiatan pemeliharaan mesin lainnya, PD dan BBM pindah ke rakor, Belanja Barang dan Jasa harus mempedomani Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD) yang berlaku Bimtek dan magang pindah sub kegiatan • Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Catatan : PD koordinasi pindah ke rakor
Perubahan 2024	:	1.

Dokumentasi	:	
Penutup	:	Demikian disampaikan, terima kasih.

Notulis,

Rosalinda

2.1.3. Dinas Pangan

Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Pertanian.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat
2. Hasil verifikasi rancangan Renja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2025 dapat dilihat pada matrik dan notulen rapat hasil verifikasi sebagaimana terlampir.



BERITA ACARA
PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nomor : 35 /V/Eko-SDA/Bappeda-2024

Dasar pelaksanaan kegiatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tanggal 23 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

Pelaksanaan Kegiatan :

Hari / Tanggal : Rabu / 15 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Objek Verifikasi :

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) **Dinas Pangan Tahun 2025**
2. Melaksanakan Urusan/Fungsi **Pemerintahan Bidang Pertanian**

Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025:

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Perangkat Daerah **telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah** sebagaimana daftar hadir pada **lampiran 1 Berita Acara ini.**
2. **Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani** terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

3. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Tim Verifikasi menyepakati hasil verifikasi dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
4. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah memprioritaskan pencapaian SPM sesuai dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah mengakomodir Usulan Pra-Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
6. Kesepakatan terkait RPJMD, Pemenuhan SPM dengan kategori sbb:
 - Tersedianya Program Unggulan sesuai SK Gubernur
 - Tersedianya Sub Kegiatan yang mengakomodir Pemenuhan Target SPM
 - Sudah mengakomodir Usulan program Prioritas sesuai usulan dari DPRD
 - Tersedianya Sub Kegiatan yang mendorong Mandatori dan Sinergitas Pusat dan Daerah
 - Tersedianya Sub Kegiatan yang menampung DAK Fisik Tahun 2025
7. Selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2025 agar masing-masing Perangkat Daerah mempedomani Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal : Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024 : **Merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan *earmark* prioritas penganggaran;**
8. Memastikan beberapa sub kegiatan untuk direncanakan dan dianggarkan pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan target yang akan dicapai, antara lain yakni :
 - a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2025;
 - b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2025 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil musrenbang);
 - c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil verifikasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1 : DAFTAR HADIR

TIM VERIFIKASI			
NO	NAMA	SKPD	TANDATANGAN
1	MARGARETA LISA	BPKAD	1.
2	Cmdru wudsmen	BPKAD	2.
3	Ranti Iskasari	Biro Org	3.
4	Novian Jumi I.	Dinas Pangan	4.
5	Hendro K	Bappeda	5.
6	Steffi Amanda	Bappeda	6.
7	Teddy Pongdamb		7.
8	Rosalinda	Bappeda	8.
9	Dewi Yanti	Bappeda	9.
10.	Benny S	Bappeda	10.
PERANGKAT DAERAH YANG DIBAHAS :			
No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	AZMI BOY	AKP	1.
2	Sofya Ska Masti	PMHP	2.
3	M. Randy	Dinas Pangan	3.
4	Syafur dhi	- - -	4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.

LAMPIRAN VERIFIKASI RANCANGAN RENJA TAHUN 2025
DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Tagging														Keterangan		
					Mendukung PN	Progul	SPM	Stunting	Kemiskin an	DAK	Pokir	Mandator i Pusat	Direktif	Mendukun g IKU	Mendukung IKD	Penunjang Urusan Pem	IPP	Mendukun g Disabilitas		Mendukung Program SAKIP	
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS PANGAN	63.547.456.000	0	63.547.456.000																	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	63.547.456.000	0	63.547.456.000																	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.371.939.500	0	25.371.939.500																	
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	406.000.000	0	406.000.000																	
2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.000.000	-56.350.600	31.649.400																	kegiatan forum OPD pindah ke sub kegiatan forum OPD, kertas, ATK, fc rasionalisasi, PD pindah ke rakor
2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.000.000	0	45.000.000																	rasionalisasi ATK, fc, kertas
2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	273.000.000	-244.522.000	28.478.000																	PD pindah ke rakor, rasionalisasi ATK, kertas
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.602.945.911	0	15.602.945.911																	
2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.117.940.311	0	15.117.940.311																	sudah mengakomodir semua
2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	410.005.600	-410.005.600	0																	sub kegiatan dihilangkan, pindah ke panatausahaan
2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.000.000	-34.003.200	40.996.800																	rasionalisasi TK, kertas, PD pindah ke rakor
2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	138.400.000	0	138.400.000																	
2.09.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	138.400.000	0	138.400.000																	ok
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.922.000	0	88.922.000																	
2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.000.000	0	69.000.000																	jumlah disesuaikan
2.09.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.922.000	0	19.922.000																	diakomodir sesuai bintek yang akan dilaksanakan
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	936.118.638	0	936.118.638																	
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.991.508	0	69.991.508																	rasionalisi sesuai kebutuhan
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.999.630	14.412.000	59.411.630																	rasionalisi sesuai kebutuhan, BBM dipindahkan
2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	0	50.000.000																	RKA disesuaikan dan dirinci kembali

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Tagging														Keterangan	
					Mendukung PN	Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	Mendukung IKU	Mendukung IKD	Penunjang Urusan Pem	IPP	Mendukung Disabilitas		Mendukung Program SAKIP
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.867.500	-15.000	94.852.500																rasionalisi sesuai kebutuhan, BBM dipindahkan, menampung perpindahan apar dari sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya BPSMP
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.340.000	-144.400	52.195.600																rasionalisi sesuai kebutuhan, BBM dipindahkan
2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.460.000	-380.000	24.080.000																rasionalisi sesuai kebutuhan, BBM dipindahkan, fc dihilangkan
2.09.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	99.460.000	-30.000	99.430.000																makan minum tamu pemda diganti ke rapat-rapat. efisiensi sesuai kebutuhan, fc dihilangkan
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000	1.671.695.300	2.171.695.300																menampung semua perpindahan perjalanan dinas dari sub kegiatan lain, - Pagu sub kegiatan rapat-rapat koordinasi menyesuaikan dengan perpindahan pagu dari sub kegiatan lain
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.303.459.400	0	1.303.459.400																
2.09.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.050.000.000	0	1.050.000.000																agar menyiapkan nota dinas persetujuan pengadaan kendaraan operasional ke Ketua TAPD
2.09.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	25.000.000	0	25.000.000																disesuaikan sesuai kebutuhan, cek RKBMD
2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	99.965.400	0	99.965.400																cek RKBMD
2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.174.000	0	89.174.000																cek RKBMD, BBM dan fd hilang
2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.320.000	0	39.320.000																untuk UPTD sesuaikan RKA
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.500.435.733	0	2.500.435.733																
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.000.000	0	45.000.000																ok
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	840.000.000	0	840.000.000																ok
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.615.435.733	-3.400.000	1.612.035.733																Honor pengadaan Barang dan Jasa dihilangkan
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.395.657.818	0	2.395.657.818																
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.040.068	0	260.040.068																sesuaikan pajak dan pemeliharaan dengan jumlah kendaraan
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	-42.410.000	157.590.000																BBM dihilangkan (untuk dinas, Balai), DPADP (penggandaan dihilangkan)
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi	1.935.617.750	0	1.935.617.750									V	V	V			V		1. UPTD BPSMP :

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Tagging														Keterangan				
					Mendukung PN	Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	Mendukung IKU	Mendukung IKD	Penunjang Urusan Pem	IPP	Mendukung Disabilitas		Mendukung Program SAKIP			
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.500.000.000	0	3.500.000.000				V	V		V			V	V								Perjalanan dinas koordinasi pindah ke rakor, rincian perjalanan dinas dilengkapi
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	2.200.000.000	0	2.200.000.000		V								V	V								perjalanan dinas yang bersifat koordinasi pindah rakor, koefisien peri dinas dilengkapi
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	100.000.000	0	100.000.000										V	V								perjalanan dinas yang bersifat koordinasi pindah rakor, koefisien peri dinas dilengkapi
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.237.868.500	0	2.237.868.500																			
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.237.868.500	0	2.237.868.500																			
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	562.868.500	-56.008.000	506.860.500		V		V	V					V	V						V		Indikator capaian program dan hasil kegiatan agar dilengkapi, perjalanan dinas luar daerah pindah ke rakor, target disesuaikan, koefisien perjalanan dinas diisi
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	150.000.000	0	150.000.000																			- Indikator capaian program dan hasil kegiatan agar dilengkapi, perbaiki RKA sesuai target dan output
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000	0	650.000.000										V	V								- Indikator capaian program dan hasil kegiatan agar dilengkapi
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	125.000.000	0	125.000.000										V	V								- Indikator capaian program dan hasil kegiatan agar dilengkapi
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	600.000.000	0	600.000.000																			- Indikator capaian program dan hasil kegiatan agar dilengkapi, Kertas diefisiensikan, rincian belanja disesuaikan kembali (efisiensi jilid, penggandaan, tinta)
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	150.000.000	0	150.000.000																			- Indikator capaian program dan hasil kegiatan agar dilengkapi, anggaran kertas disesuaikan, rincian perjalanan dinas dan koefisien agar dilengkapi



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 0751.7056335 Fax.0751.7055676

NOTULEN RAPAT

Kepada : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Bidang EKO SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tanggal : 15 Mei 2024
Perihal : Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provnsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	:	Rabu, 15 Mei 2024 Ruang Rapat Lt. I Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dasar	:	Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang EKOSDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	:	- Dinas Pangan - Fungsional dan Staf Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat - Inspektorat - BPKD - Biro Organisasi - Biro PBJ
Agenda Rapat	:	Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provnsi Sumatera Barat Tahun 2025
Pembahasan Renja 2025	:	Bappeda <ul style="list-style-type: none">• Memastikan bahwa penyusunan program kegiatan indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat telah sesuai dgn target sasaran dan prioritas pembangunan daerah (indikator kinerja Utama dan indikator Kinerja daerah)• Tindak lanjut terhadap hasil reuiu inspektorat terhadap laporan Kinerja Instansi pemerintah daerah Tahun 2023• Penyesuaian cascading pada masing-masing perangkat daerah• Rasionalisasi anggaran pada DPA tahun 2024• Memastikan penyusunan belanja pada masing-masing sub kegiatan telah sesuai dgn surat Gubernur Sumatera Barat nomor 030/237.a/BPKAD-pAP/2024 tanggal 4 april 2024 perihal efesiensi dan penghematan belanja Tahun anggaran 2024• Tindaklanjut Hasil Evaluasi BPKP terhadap belanja sub kegiatan penanganan kemiskinan dan stunting pada APBD Tahun 2024 Dinas Pangan <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Catatan : ATK dan pengandaan dirasionalkan, forum OPD pindahkan ke sub kegiatan yg telag tersedia, perjadiin pindah ke rakor• Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Catatan : ATK dan pengandaan dirasionalkan,

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Catatan : ATK dan pengadaan dirasionalkan, forum OPD pindahkan ke sub kegiatan yg telag tersedia, perjadin pindah ke rakor • Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Catatan : sudah mengakomodir semua • Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas • Catatan : sub kegiatan dihilangkan pindahkan ke sub penataa usahaan • Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD • Catatan : ATK dan Pengandaan dirasionalisasikan, perjadin pindah kerapat rapat koordinasi • Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD • Catatan : sesuai • Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut • Catatan : jumlah pakaian dinas disesuaikan dgn kebutuhan • Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan • Catatan : diakomodir sesuai dgn bintek yg akan dilaksanakan • Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi • Catatan : rasionalisasikan ssuai dgn kebutuhan • Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Catatan : BBM di hilangkan, uraian belanja dirasionalisasikan • Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga • Catatan : RKA disesuaikan dan dirinci kembali • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Catatan : rasionalisasi sesuai kebutuhan • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan • Catatan : rasionalisasi sesuai kebutuhan, bbm dihilangkan • Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan • Catatan : rasionalisasi sesuai kebutuhan, bbm dihilangkan, pengandaan dihilangkan • Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu • Catatan : makan minum tamu pemda diganti ke rapat biasa, efisiensi sesuai kebutuhan • Kegiatan ; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Catatan : menampung perpindahan perjadin sub kegiatan lainnya • Kegiatan ; Pengadaan Mebel • Catatan : Cek RKBMD • Kegiatan ; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Catatan : Cek RKMBD
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Catatan : Sesuaikan dengan RKA • Kegiatan ; Penyediaan Jasa Surat Menyurat Catatan : ok sesuai • Kegiatan ; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : honor pengadaan barang dan jasa dihilangkan, anggaran disesuaikan • Kegiatan ; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : sesuaikan rincian belanja kembali jumlah kendaraan dgn pajak dan pemeliharaan kendaraan • Kegiatan ; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : BBMnya dihilangkan, • Kegiatan ; Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Catatan : terkait kajian Agar dikoordinasikan dgn balitbang, ATK dirasionalisasikan, perjalanan dinas luar daerah yg sifatnya koordinasi dipindahkan ke Rakor, kegiatan mendukung Progul, Kemiskinan, Stunting, IKU, IKD • Kegiatan ; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Catatan : RKA disesuaikan dan dirinci kembali sesuai target dan output, kegiatan mendukung IKU, IKD • Kegiatan ; Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Catatan : item budibag disesuaikan kembali, folome utk elanj barang yg diserahkan kemastarakat disesuaikan , sewa hotel disesuaikan, perjalanan dinas yg sifatnya koordinasi pindah ke rakor, belanja modal dihilangkan satu unit 1 pindah kesekretariat ke belanja rumash tangga, kegiatan Progul, Stunting, kemiskinan, Direktif IKU, IKD • Kegiatan ; Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi Catatan : sesuai, kegiatan mendukung IKU • Kegiatan ; Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi Catatan : keluarannya disesuaikan, rincian honorium jasa petugas , perjadin yg sifat koordinasi pindahkan kerakor, koefiensi rincian perjalanan dinas disesuaikan, Kegiatan mendukung, progul, kemiskinan, IKU, IKD • Kegiatan ; Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi Catatan : Koefiensi perjalanan dinas disempurnakan, kegiatan mendukung IKU, IKD • Kegiatan ; Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Catatan : sesuai, kegiatan mendukung IKU, IKD • Kegiatan ; Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Catatan : ATK dirasionalisasikan, kegiatan mendukung IKU, IKD
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ; Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Catatan : sesuai, kegiatan mendukung IKU, IKD • Kegiatan ; Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Catatan : kegiatan mendukung IKU, IKD • Kegiatan ; Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Catatan : Perjadin pindahkan ke rakor, utk cendramata agaraannya disesuaikan kegiatan mendukung stunting, IKU, IKD • Kegiatan ; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Catatan : uraian koefisiennya disesuaikan, perjadin pindahkan kerakor, belanja modal pindakan kebelanja peralatan, kegiatan mendukung IKU, IKD, Stunting sewa hotel yg fulday pindahkan ke Aula • Kegiatan ; Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Catatan : Perjaldin yg persifat koordinasi pindahkan ke rakor, Kegiatan mendukung IKU, IKD • Kegiatan ; Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Catatan : perjadin dipindahkan ke rakor, kegiatan mendukung IKU, IKD • Kegiatan ; Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Catatan : perjadin sifatnya koordinasi pindakan ke rakor, perjadin diperbaiki, kegiatan mendukung stunting, kemiskinan , Iku, IKD • Kegiatan ; Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi Catatan : perjalanan koefisennya dilengkapi dan yg bersifat koordinasi di pindahkan kerakor, kegiatan Iku, IKD • Kegiatan ; Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi Catatan : perjalanan koefisennya dilengkapi dan yg bersifat koordinasi di pindahkan kerakor, kegiatan Iku, IKD • Kegiatan ; Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Catatan : indikator capai dilengkapi • Kegiatan ; Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Catatan : hasil capaian program dan target , indikator hasil utk dimasukan, koefiennys dijelaskan, rincian perjalanan dinas dilengkapi, ATK diefesiensikan, kegiatan mendukung, IKU, IKD • Kegiatan ; Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Catatan : BBM dihilangkan, • Kegiatan ; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
--	---

		<p>Catatan : pengadaan apar pindah kelosgitik kantor, pengadaan semen batu pasir rincian belanja disesuaikan, kegiatan penunjang urusan , iku ikd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ; Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Catatan : hasil capaian program dan target , indikator hasil utk dimasukan, target disesuaikan dgn kebutuhan, perjadiin luar daerah pindahkan ke rakor, kegiatan ini mendukung progul, stunting, kemiskinan, IKU, IKD, Sakip, rincian koifisien nya harus diuraikan • Kegiatan ; Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Catatan : hasil capaian program dan target , indikator hasil utk dimasukan, rincian koifisien nya harus diuraikan, diperbaiki RKA sesuai dengan target dan output • Kegiatan ; Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Catatan : hasil capaian program dan target , indikator hasil utk dimasukan, kegiatan mendukung IKU, IKD • Kegiatan ; Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Catatan : hasil capaian program dan target , indikator hasil utk dimasukan, rincian koifisien nya harus diuraikan, ATK diefesiensikan, uraian rincian belanja disesuaikan kembali, pengadaan disesuaikan, diperbaiki RKA sesuai dengan target dan output, Kegiatan mendukung IKU, IKD Sakip • Kegiatan ; Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : agar menyiapkan nota dinas persetujuan pengadaan oprasional ketua TAPD • Kegiatan ; Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Catatan : Disesuaikan sesuai kebutuhan cek RKBMD • Kegiatan ; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Catatan : belanja bahan kimia pindahkan ke perlengkapan kantor, • Kegiatan ; Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Catatan : dipending dulu • Kegiatan ; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Catatan : sesuai kegiatan mendukung progul , Iku, IKD • Kegiatan ; Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi Catatan : sesuai, kegiatan mendukung progul, IKU, IKD • Kegiatan ; Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Catatan : hasil capaian program dan target , indikator hasil utk dimasukan, kegiatan mendukung IKU, IKD, Sakip
--	--	---

Dokumentasi	:	
Penutup	:	Demikian disampaikan, terima kasih.

Notulis,

Rosalinda

2.1.4. Dinas Kelautan dan Perikanan

Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Pertanian.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat
2. Hasil verifikasi rancangan Renja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2025 dapat dilihat pada matrik dan notulen rapat hasil verifikasi sebagaimana terlampir.



BERITA ACARA
PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nomor : 51/V/Eko-SDA/Bappeda-2024

Dasar pelaksanaan kegiatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tanggal 23 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

Pelaksanaan Kegiatan :

Hari / Tanggal : Rabu / 29 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Objek Verifikasi :

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) **Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025**
2. Melaksanakan Urusan/Fungsi **Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025:

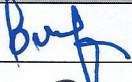
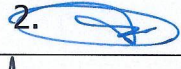
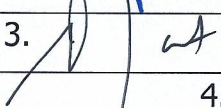

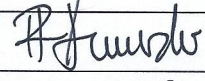

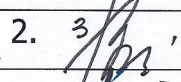
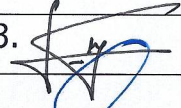

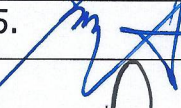
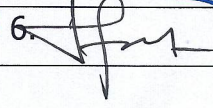
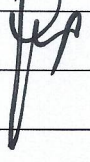
1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Perangkat Daerah **telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah** sebagaimana daftar hadir pada **lampiran 1 Berita Acara ini.**
2. **Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani** terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-

- 2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Tim Verifikasi menyepakati hasil verifikasi dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
 4. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah memprioritaskan pencapaian SPM sesuai dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 5. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah mengakomodir Usulan Pra-Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
 6. Kesepakatan terkait RPJMD, Pemenuhan SPM dengan kategori sbb:
 - Tersedianya Program Unggulan sesuai SK Gubernur
 - Tersedianya Sub Kegiatan yang mengakomodir Pemenuhan Target SPM
 - Sudah mengakomodir Usulan program Prioritas sesuai usulan dari DPRD
 - Tersedianya Sub Kegiatan yang mendorong Mandatori dan Sinergitas Pusat dan Daerah
 - Tersedianya Sub Kegiatan yang menampung DAK Fisik Tahun 2025
 7. Selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2025 agar masing-masing Perangkat Daerah mempedomani Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal : Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024 : **Merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan *earmark* prioritas penganggaran;**
 8. Memastikan beberapa sub kegiatan untuk direncanakan dan dianggarkan pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan target yang akan dicapai, antara lain yakni :
 - a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2025;
 - b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2025 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil musrenbang);
 - c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil verifikasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1 : DAFTAR HADIR

DKP 2025

TIM VERIFIKASI			
NO	NAMA	SKPD	TANDATANGAN
1	Benny S	Bappeda	1. 
2	Ade Ridha Utami	Biro Organisasi	2. 
3	Deviyanti	Bappeda	3. 
4	Steffi Amanda	Bappeda	4. 
5	Rosalinda	Bappeda	5. 
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10.			10.
PERANGKAT DAERAH YANG DIBAHAS :			
No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Reri Suriati	Sekretaris	1. 
2	Yosy Novita	JF Perencana	2. 
3	Lastri Mulyanti	Ka. UPD BPBALP	3. 
4	ILWA	Ka. UPD PPKW I	4. 
5	Sandy Wale	Kabid. PDSKP	5. 
6	YOFRIANTO	Ka. UPD PPKW III	6. 
7	Yulia Madhama	Kabid. tanyag	7. 
8			8.
9			9.
10			10.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 0751.7056335 Fax.0751.7055676

NOTULEN RAPAT

Kepada : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Bidang EKO SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tanggal : 29 Mei 2024
Perihal : Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	:	Rabu 29 Mei 2024 Ruang Rapat Lt. I Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dasar	:	Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang EKOSDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	:	- DKP - Fungsional dan Staf Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat - Inspektorat - BPKD - Biro Organisasi - Biro PBJ
Agenda Rapat	:	Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
Pembahasan Renja 2025	:	Bappeda <ul style="list-style-type: none">• Memastikan bahwa penyusunan program kegiatan indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat telah sesuai dgn target sasaran dan prioritas pembangunan daerah (indikator kinerja Utama dan indikator Kinerja daerah)• Tindak lanjut terhadap hasil reuiu inspektorat terhadap laporan Kinerja Instansi pemerintah daerah Tahun 2023• Penyesuaian cascading pada masing-masing perangkat daerah• Rasionalisasi anggaran pada DPA Ztahun 2024• Memastikan penyusunan belanja pada masing-masing sub kegiatan telah sesuai dgn surat Gubernur Sumatera Barat nomor 030/237.a/BPKAD-pAP/2024 tanggal 4 april 2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja Tahun anggaran 2024• Tindaklanjut Hasil Evaluasi BPKP terhadap belanja sub kegiatan penanganan kemiskinan dan stunting pada APBD Tahun 2024 DKP <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Catatan : kegiatan Forum OPD pindah ke sub kegiatan pelaksanaan forum Perangkat Daerah perjalanan dinas rapat koordinasi pindah ke sub kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi seminar kit di uraikan• Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Catatan : Penyesuaian indikator - Belanja Perjalanan dinas Koordinasi 237.735.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah• Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Catatan : belanja di rinci• Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

	<p>Catatan : honorarium belanja barang dan jasa di hilangkan lembur di pindah ke sub kegiatan koordinasi penyusunan laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD <p>Catatan : Perjalanan Dinas 114.210.000, BBM 4.240.000 (Rasionalisasi, koordinasi pindah ke rapat2 koordinasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD <p>Catatan : Penyesuaian Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD <p>Catatan : perjalanan dinas untuk pengawasan aset di luar daerah, dirasionalkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD <p>Catatan : Perjalanan Dinas 116.880.000, BBM 3.500.000, Penyesuaian output, rapat koordinasi pindah ke rapat2 koordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya <p>Catatan : Pakaian lapangan 30 stel di hilangkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi <p>Catatan : belanja pakaian dihilangkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan <p>Catatan : belanja agar di rinci</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor <p>Catatan : penyesuaian indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga <p>Catatan : Penyesuaian indikator dan pengelompokan belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor <p>Catatan : Penyesuaian indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan <p>Catatan : Penyesuaian Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>Catatan : penambahan pengelompokan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <p>Catatan : bentor untuk pengangkut sampah, kendaraan dinas di hilangkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengadaan Mebel <p>Catatan : Penyesuaian indikator, Kursi Roda (pindah ke Logistik Kantor, perabot lainnya), Lemari Besi (peralatan perlengkapan kantor)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <p>Catatan : Penyesuaian indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>Catatan : ditambahkan konsultan perencana dan pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat <p>Catatan : Materai ke logistik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik <p>Catatan : Pastikan kebutuhan 1 tahun, VPN Radio Nanobridge dihilangkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>Catatan : outsourcing 13 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <p>Catatan : Penyesuaian indikator dan rincian belanja disesuaikan kebutuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya <p>Catatan : Penyesuaian indikator, Cek RKPBU dan RKBMD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <p>Catatan : Penyesuaian indikator, cek RKPBU dan RKMD kondisi barang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat <p>Catatan : target capaian di input, dan juga rincian belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <p>Catatan : terdapat 3 sub stansi kegiatan, rehabilitasi terumbu karang, penanaman mangrove dan penanaman cemara laut, indikator di sesuaikan</p>
--	--

	<p>dengan pagu anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Catatan : indikator di sesuaikan dengan pagu anggaran, perjalanan dinas agar lebih seletif sesuai surat edaran gubernur • Kegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Catatan : indikator di sesuaikan dengan pagu anggaran, perjalanan dinas agar lebih seletif sesuai surat edaran gubernur • Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Catatan : sub stansi kegiatan berupa penyediaan data dan informasi dipindah ke sub kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, kegiatan ini dihilangkan indikator di sesuaikan dengan pagu anggaran, perjalanan dinas agar lebih seletif sesuai surat edaran gubernur • Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Catatan : indikator di sesuaikan dengan pagu anggaran, perjalanan dinas agar lebih seletif sesuai surat edaran gubernur sub kegiatan mengakomodir usulan kab kota pada saat musrenbang dan progul • Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Catatan : indikator di sesuaikan dengan pagu anggaran, perjalanan dinas agar lebih seletif sesuai surat edaran gubernur • Kegiatan : Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil Catatan : indikator di sesuaikan dengan pagu anggaran, perjalanan dinas agar lebih seletif sesuai surat edaran gubernur, komposisi BBM dan Perjalanan dinas • Kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Catatan : Perjalanan Dinas 67.414.000 Rasionalisasi kan • Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut Catatan : indikator di sesuaikan dengan pagu anggaran Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang dihilangkan • Kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Catatan : indikator di sesuaikan dengan pagu anggaran • Kegiatan : Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Catatan : monitoring ke pembudidaya di lakukan uji sampel n dll, atau laporan dari masyarakat, dilakukan pengujian • Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Catatan : indikator di sesuaikan kembali rincian belanja di rasional kan kembali seperti ATK, Kertas, Eksternal Hardisk dan perjalanan dinas • Kegiatan : Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi Catatan : agar di rincian • Kegiatan : Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Catatan : indikator agar di sesuaikan kembali . Penanganan perkara (penyidik dll) pindah sub diatas pengawasan produk pindah sub perjadiin koordinasi (rapat koordinasi) dan Dalam rangka Dalam rangka pengawasan pembudidaya dan Pengolah ikan ke Kab/Kota pindah ke Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi • Kegiatan : Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Catatan : rincian belanja dan sub kegiatan • Kegiatan : Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi Catatan : Belanja perjadiin Konsultasi RZWP3K pidanh ke rapat dan koordinasi • Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat
--	---

	<p>Pengawas (POKMASWAS)</p> <p>Catatan : agar di rinci</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi <p>Catatan : indikator di sesuaikan dengan pagu anggaran, perjalanan dinas agar lebih selektif sesuai surat edaran gubernur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi <p>Catatan : sub kegiatan ini hanya menampung kegiatan penyediaan data dan informasi, terkait promosi investasi dan akses permodalan di pindahkan ke sub kegiatan Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing, untuk titipan sementara di hilangkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing <p>Catatan : rincian belanja dan sub kegiatan diperbaiki semua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar <p>Catatan : rincian belanja diperbaiki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi <p>Catatan : rincian belanja diperbaiki kembali sesuai dengan keluaran sub kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor <p>Catatan : ok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <p>Catatan : Penyesuaian indikator Sofa Tamu (belanja mebel) AC (Peralatan rumah tangga)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik <p>Catatan : Pastikan kebutuhan 1 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <p>Catatan : Penyesuaian indikator belanja dan rincian belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya <p>Catatan : Penyesuaian indikator Cek RKPBU dan RKBMD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi <p>Catatan : Penyesuaian indikator, cek RKPBU dan RKMD kondisi barang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing <p>Catatan : perjalanan dinas lebih selektif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar <p>Catatan : Belanja kelengkapan laboratorium 922.965.000 di rinci, dan dimasukkan kedalam pengelompokan sub kegiatan yang sesuai dengan objek belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi <p>Catatan : ok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengadaan Mebel <p>Catatan : Kasur (peralatan rumah tangga) Lemari Kayu (perlengkapan kantor)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <p>Catatan : ok</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Catatan : hanya listrik • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : Penyesuaian Indikator dan rincian belanja disesuaikan kebutuhan • Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut Catatan : Perjadiin untuk perjalanan ke instalasi UPOTD yang berada di pesisir selatan dan di rasionalkan Pemeliharaan gedung dipindahkan ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor • Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut Catatan : ATK dan dll pindah ke logistik, untuk pemeliharaan genset di sub kegiatan pemeliharaan mesin lainnya perjadiin koordinasi pindah ke sub kegiatan Rapat dan koordinasi • Kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Catatan : ATK dan dll pindah ke logistik, Perjadiin dan BBM di rasionalkan • Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Catatan : ok • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Pompa Air, mesin potong rumput (peralatan mesin lainnya) AC (peralatan rumah tangga) • Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Catatan : Jasa instalasi (pemeliharaan gedung kantor) • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : Penyesuaian Indikator dan rincian belanja disesuaikan kebutuhan • Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara • Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Catatan : Penyesuaian indikator Konsultan perencanaan dan pengawasan ? Belanja mesin potong rumput (peralatan mesin lainnya) AC (peralatan rumah tangga) Mushola (pengadaan sarpras gedung) • Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Catatan : Jasa Petugas Operasional penjaga kawasan konservasi daerah pada sub kegiatan ini. Bimtek agar dirinci peruntukan termasuk penggantian transport perjalanan dinas agar di rasionalkan ATK ke logistik kantor • Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Catatan : indikator di sesuaikan dengan pagu anggaran Pembuatan Merk dinas ditinjau ulang apa bila dilaksanakn sub kegiatan yang digunakan Perlengkapan kantor • Kegiatan : Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi Catatan : jasa petugas adalah ABK kapal Pemeliharaan (Pemeliharaan Kapal) Perjalanan Dinas (efektifitas efesiensi) • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : Penyesuaian Indikator belanja • Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : Belanja sewa kendaraan, Sub Kegiatan tidak Cocok, pindah ke sewa kendaraan • Kegiatan : Pengadaan Mebel Catatan : Penyesuaian indikator Rak Piring, Gorden, Bed cover (Peralatan rumah tangga) pengadaan tempat tidur di rinci • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : Penyesuaian indikator Service (pemeliharaan peralatan mesin) Kulkas, AC, Kipas angin, Dispenses, kompor dll (rumah tangga) • Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan : Penyesuaian indikator Pastikan kebutuhan 1 tahun • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Catatan : Penyesuaian Indikator dan rincian belanja disesuaikan kebutuhan • Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya • Catatan : Konsultansi perencanaan dan pengawasan? • Kegiatan : Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil • Catatan : Perjalanan Dinas 142.500.000 BBM 58.816.300 RASIONALISASI sesuai Sub Kegiatan • Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan • Catatan : honor Pejabat Pengadaan dihilangkan, BBM dan Perjadin di selektifkan Pemeliharaan rumah dinas pindah ke sub kegiatan pemeliharaan gedung • Kegiatan : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan • Catatan : honor Pejabat Pengadaan dihilangkan, BBM dan Perjadin di selektifkan Pemeliharaan rumah dinas pindah ke sub kegiatan pemeliharaan gedung • Kegiatan : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan • Catatan : (Sub kegiatan campur2) Alat listrik, Docking Kapal, prasarana pelabuhan) Petugas data, mekanik, operator (Layanan Umum) Pemeliharaan Mesin Es, mesin, CCTV, AC, dll (Pemeliharaan peralatan) Pemeliharaan gedung kantor Perjalanan Dinas 300.200.000 BBM Kendaraan 292.789.218 Belanja peralatan mesin 38.907.000 • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Catatan : tidak perlu BBM Operasional Mesin • Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Catatan : bentor untuk pengangkut sampah • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Catatan : Penyesuaian indikator CCTV, Mesin Potong rumput (mesin peraltan lainnya) AC, TV, Sound system (Rumah tangga) • Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Catatan : ok • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Catatan : Penyesuaian Indikator dan cek jumlah kendaraan • Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Catatan : Penyesuaian indikator Cek RKPBU dan RKBMD • Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya • Catatan : pemeliharaan rumah dinas pindah ke sub kegiatan ini • Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan • Catatan : BBM 15.978.339 Perjalanan Dinas 241.680.000, di rasionalkan Honor pelaksana kegiatan TPT dihilangkan Penyesuaian satuan/rincian belanja Pemeliharaan rumah dinas pindah ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor • Kegiatan : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan • Catatan : oli pabrik es, garam untuk pabrik es, pakaian dinas PDL untuk petugas lapangan saja BBM dan Perjadin di rasionalkan • Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Catatan : Jasa instalasi listrik (Pemeliharaan Gedung Kantor) • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Catatan : indikator di sesuaikan • Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Catatan : dihilangkan • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Catatan : BBM dihilangkan • Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Catatan : air sumur Bor, hanyalistrik • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : cek jumlah kendaraan, samakan dengan keluaran sub kegiatan • Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Catatan : belanja sub kegiatan di rinci tambahkan konsultan perencana dan pengawasa • Kegiatan : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Catatan : Perjadimn rasional kan dan di rinci • Kegiatan : Pengadaan Mebel Catatan : Mebel dirasionalkan kembali
Dokumentasi	:	
Penutup	:	Demikian disampaikan, terima kasih.

Notulis,

Rosalinda

2.1.5. Dinas Kehutanan

Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Pertanian.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat
2. Hasil verifikasi rancangan Renja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2025 dapat dilihat pada matrik dan notulen rapat hasil verifikasi sebagaimana terlampir.



BERITA ACARA
PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nomor : 43 /V/Eko-SDA/Bappeda-2024

Dasar pelaksanaan kegiatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tanggal 23 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

Pelaksanaan Kegiatan :

Hari / Tanggal : Selasa / 21 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Objek Verifikasi :

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) **Dinas Kehutanan Tahun 2025**
2. Melaksanakan Urusan/Fungsi **Pemerintahan Bidang Kehutanan**

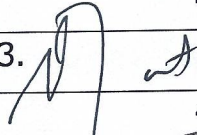


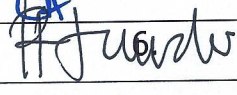
Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025:

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Perangkat Daerah **telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah** sebagaimana daftar hadir pada **lampiran 1 Berita Acara ini.**
2. **Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani** terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

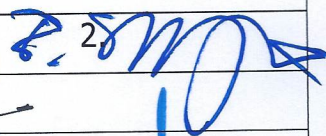

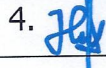
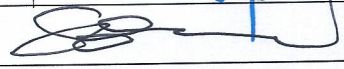
3. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Tim Verifikasi menyepakati hasil verifikasi dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
4. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah memprioritaskan pencapaian SPM sesuai dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah mengakomodir Usulan Pra-Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
6. Kesepakatan terkait RPJMD, Pemenuhan SPM dengan kategori sbb:
 - Tersedianya Program Unggulan sesuai SK Gubernur
 - Tersedianya Sub Kegiatan yang mengakomodir Pemenuhan Target SPM
 - Sudah mengakomodir Usulan program Prioritas sesuai usulan dari DPRD
 - Tersedianya Sub Kegiatan yang mendorong Mandatori dan Sinergitas Pusat dan Daerah
 - Tersedianya Sub Kegiatan yang menampung DAK Fisik Tahun 2025
7. Selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2025 agar masing-masing Perangkat Daerah mempedomani Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal : Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024 : **Merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan *earmark* prioritas penganggaran;**
8. Memastikan beberapa sub kegiatan untuk direncanakan dan dianggarkan pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan target yang akan dicapai, antara lain yakni :
 - a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2025;
 - b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2025 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil musrenbang);
 - c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil verifikasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1 : DAFTAR HADIR

TIM VERIFIKASI			
NO	NAMA	SKPD	TANDATANGAN
1.			1.
2.			2.
3.	Devranh	Bappeda	3. 
4.	Hendrik &	Bappeda	4. 
5.	Steph Amanda	Bappeda	5. 
6.	Rosalinda	Bappeda	6. 
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

PERANGKAT DAERAH YANG DIBAHAS :

No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.			1.
2.	Bambang Suryono	Kabid PDAS RHL	2. 
3.	Sayogo Hultomo	babid prpn	3. 
4.	Hendrio Fadly	Ka LPTD KPHD Panniduh	4. 
5.	Syamsul Bahri	KKPHL Bukit Bar	5. 
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Tagging														Keterangan							
					Mendukun g PN	Progul	SPM	Stunting	Kemiskin an	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	Mendukun g IKU	Mendukun g IKD	Penunjang Urusan Pem	IPP	Mendukun g Disabilitas		Mendukung Program SAKIP						
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.476.454.000	0	2.476.454.000																						
3.28.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	482.074.000	0	482.074.000																						
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	644.380.000	0	644.380.000																						
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	750.000.000	0	750.000.000																						
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600.000.000	0	600.000.000																						
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.882.916.466	0	3.882.916.466																						
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	0	20.000.000																						
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	856.320.000	0	856.320.000																						
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.006.596.466	0	3.006.596.466																						
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.800.000.000	0	3.800.000.000																						
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.185.000.000	0	1.185.000.000																						
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.350.000.000	0	1.350.000.000																						
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000	0	600.000.000																						
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	665.000.000	0	665.000.000																						
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	23.878.712.000	0	23.878.712.000																						
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	6.666.171.700	0	6.666.171.700																						
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	6.666.171.700	0	6.666.171.700	V	V	V		V					V	V	V	V						V			
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHKI)	800.000.000	0	800.000.000																						
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	800.000.000	0	800.000.000																						
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	780.000.000	0	780.000.000																						
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	160.000.000	0	160.000.000	V									V	V	V							V			
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	150.000.000	0	150.000.000																						

usulan pengadaan kendaraan dinas dipindahkan ke sekretariat

Rincian belanja diperbaiki dan disesuaikan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 0751.7056335 Fax.0751.7055676

NOTULEN RAPAT

Kepada : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Bidang EKO SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tanggal : 21 Mei 2024
Perihal : Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	:	Selasa, 21 Mei 2024 Ruang Rapat Lt. I Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dasar	:	Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang EKOSDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	:	- Dinas kehutanan - Fungsional dan Staf Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat - Inspektorat - BPKD - Biro Organisasi - Biro PBJ
Agenda Rapat	:	Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
Pembahasan Renja 2025	:	<p>Bappeda</p> <ul style="list-style-type: none">• Memastikan bahwa penyusunan program kegiatan indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat telah sesuai dgn target sasaran dan prioritas pembangunan daerah (indikator kinerja Utama dan indikator Kinerja daerah)• Tindak lanjut terhadap hasil reuiu inspektorat terhadap laporan Kinerja Instansi pemerintah daerah Tahun 2023• Penyesuaian cascading pada masing-masing perangkat daerah• Rasionalisasi anggaran pada DPA tahun 2024• Memastikan penyusunan belanja pada masing-masing sub kegiatan telah sesuai dgn surat Gubernur Sumatera Barat nomor 030/237.a/BPKAD-pAP/2024 tanggal 4 april 2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja Tahun anggaran 2024• Tindaklanjut Hasil Evaluasi BPKP terhadap belanja sub kegiatan penanganan kemiskinan dan stunting pada APBD Tahun 2024 <p>Dinas Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Catatan : disesuaikan kembali dan Rakor dipindahkan ke Rapat Koordinasi• Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Catatan : bagian program memonev kegiatan di KPH, dirasional untuk kegiatan Monevnya• Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Catatan : ok• Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

		<p>Triwulanan/Semesteran SKPD Catatan : disesuaikan kembali lembur dan perjalanan dinasny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Catatan : disesuaikan • Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Catatan : disesuaikan • Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Catatan : disesuaikan • Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Catatan : pakaian yg boleh disesuaikan sesuai Surat Edaran (PDH/ Batik/..) untuk baju kaus dihilangkan dan jumlah disesuaikan dgn jumlah pegawai • Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Catatan : dari UPTD binteknya dianggar di kegiatan ini • Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Catatan : Oke..rasionalisasikan • Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : disesuaikan • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : dirasionalkan • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan : dirasionalkan • Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Catatan : ok • Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Catatan : disesuaikan • Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Catatan : ditiadakan • Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : ditiadakan • Kegiatan : Pengadaan Mebel Catatan : dirasionalkan disesuaikan • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : pengadaan CCTV, letakan di kegiatan ini • Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Catatan : matrai masuk kebelanja logistik • Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Catatan : disesuaikan • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : Rohaniwan, istruktur olahraga, Tenaga administrasi
--	--	---


		<p>dll....disesuaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : indikatornya disesuaikan lagi • Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Catatan : indikatornya disesuaikan lagi • Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Catatan : disesuaikan • Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Catatan : sesuai lagi rekeningnya • Kegiatan : Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Catatan : usulan pengadaan kendaraan dinas pindahkan kesekretariat • Kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Catatan : tambahan uraian belanja dgn atk, pengadaan dll • Kegiatan : tambahan uraian belanja dgn atk, pengadaan dll Catatan : uraian belanja disesuaikan lagi • Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung Catatan : uraian belanja disesuaikan lagi (ATK, Biaya Cetak, BBM, rapat) • Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Catatan : perjalanan dinas dipindahkan ke rapat rapat koordinasi • Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Catatan : disesuaikan rekening dan komponen anggarannya • Kegiatan : disesuaikan rekening dan komponen anggarannya Catatan : perjadi dipindahkan ke rapat rapat koordinasi • Kegiatan : Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Catatan : kegiatan untuk penilaian penanaman hutan 5 thn sebelumnya, perjadi pindahkan ke rakor • Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Catatan : Perjadi 117,7 Jt, Perjadi ke jakarta pindah Ke Rapat2 Kordinasi di Sekretariat • Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Catatan : Rincian uraian belanja belum ada agar dibuatkan rincian uraian belanja • Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi Catatan : perjadi disesuaikan dipindahkan ke rapat rapat koordinasi, dirasionalisasikan
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : perjadin disesuaikan dipindahkan ke rapat rapat koordinasi, dirasionalisasikan Catatan : perjadin disesuaikan dipindahkan ke rapat rapat koordinasi, dirasionalisasikan • Kegiatan : Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Catatan : utk kegiatan yg sifatnya tdk bisa diakomodir gedung kantor baru gunakan sewa hotel. Efisiensi dan efektifitas kegiatan diperhatikan kembali • Kegiatan : Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Catatan : Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial • Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan Catatan : perjadin kejakarta pindahkan kerapat rapat koordinasi di sekretariat • Kegiatan : Penyiapan Perhutanan Sosial Catatan : perjadin pindahkan kerapat rapat koordinasi • Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS Catatan : perjadin dipindahkan ke rapat koordinasi • Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Catatan : perjadin pindahkan kerapat koordinasi • Kegiatan : Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Catatan :oke • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan :oke • Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Catatan :oke • Kegiatan : Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Catatan : untuk bibit penghijauanya disesuaikan • Kegiatan : Sertifikasi Sumber Benih Catatan : perjadin utk identifikasi dan pembinaan...oke • Kegiatan : Sertifikasi Mutu Benih Catatan : oke • Kegiatan : Sertifikasi Mutu Bibit Catatan : disesuaikan menjadi 10 perjadinnya • Kegiatan : Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Catatan : oke • Kegiatan : Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan Catatan : rekening sudah sesuai • Kegiatan : Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan Catatan : sub yg diganti kekegiatan baru • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
--	---

	<p>Catatan :ok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Catatan : ok sesuai • Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Catatan : ok sesuai • Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Catatan : ok sesuai • Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Catatan : ok sesuai • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : ok sesuai • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan : ok • Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Catatan :ok • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan :ok • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : ok sesuai • Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Catatan : ok • Kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Catatan : perjadiin pindahkan ke rapat koordinasi • Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Catatan : ok sesuai • Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Catatan : ok sesuai • Kegiatan : Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Catatan : Rasionalisasi anggaran utk target 30 Hektar, berbeda lokasi dgn kegiatan sebelumnya • Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Catatan : ok sesuai • Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Catatan : targetnya kinerja belum ada, hasilnya juga blm ada • Kegiatan : Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan Catatan : ok sesuai
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Catatan : ok sesuai • Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Catatan : anggaran dipindahkan ke dinas, • Kegiatan : anggaran dipindahkan ke dinas, Catatan : anggaran sebesar Rp. 500 Juta pindahkan ke Sekretariat
Dokumentasi	:	
Penutup	:	Demikian disampaikan, terima kasih.

Notulis,



Rosalinda

2.2. Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

2.2.1. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Verifikasi rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Pertanian.

Verifikasi terhadap Perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 :

3. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat
4. Hasil verifikasi Perubahan rancangan Renja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2024 dapat dilihat pada matrik dan notulen rapat hasil verifikasi sebagaimana terlampir.



BERITA ACARA

PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 38 /V/Eko-SDA/Bappeda-2024

Dasar pelaksanaan kegiatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4003/Bangda Tanggal 14 September 2021, Dirjen Bina Bangda selaku Ketua Pokja pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah telah menyampaikan rancangan pemutakhiran perencanaan pembangunan daerah untuk dikompilasi bersama-sama dengan urusan lain untuk dilakukan pemutakhiran
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 84, 134, 352, 362, mengamanatkan bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 untuk disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024.
9. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

Pelaksanaan Kegiatan :

Hari / Tanggal : Kamis / 16 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Objek Verifikasi :

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) **Perubahan tahun 2024 Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortilultura**
2. Melaksanakan Urusan/Fungsi **Pertanian**

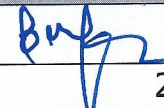

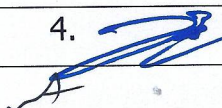
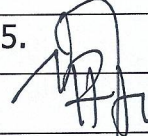
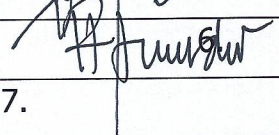

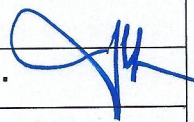
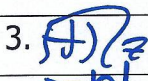


Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama dengan Perangkat Daerah **telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja Perubahan Tahun 2024** sebagaimana daftar hadir pada **lampiran 1 Berita Acara ini**.
2. **Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani** terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang terdiri dari Permasalahan 2016-2021, Isu Strategi 2021-2026, Tujuan 2021-2026, Sasaran 2021-2026, Indikator Kinerja Sasaran 2021-2026, Strategi 2021-2026, Arah Kebijakan 2021-2026, Program 2021-2021 dan Indikator Kinerja Program 2021-2021, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. **Penjelasan terkait dengan Point 2 diatas sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 yakni sebagai berikut :**
 - a. **Permasalahan Pembangunan** adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
 - b. **Isu Strategis** adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
 - c. **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
 - d. **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
 - e. **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 - f. **Arah Kebijakan** adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 - g. **Program Pembangunan Daerah** adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, yang mengacu kepada Program yang tertuang dalam Permendagri 90 Tahun 2019.

- h. **Indikator Kinerja** adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil verifikasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1 : DAFTAR HADIR

TIM VERIFIKASI			
NO	NAMA	SKPD	TANDATANGAN
1	Benny S	Bappeda	1. 
2			2.
3	Steele Amanda	Bappeda	3. 
4	Rahim Ihsan A.T	BPKAD	4. 
5	Peviyanti	Bappeda	5. 
6	Rosdinda	Bappeda	6. 
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
PERANGKAT DAERAH YANG DIBAHAS :			
No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Agri Yogi Rivaldi	PI	1. 
2	Agustian	Bid. Transjember	2. 
3	Hendra Zondan	BP2MB-858	3. 
4	Syofriawan	WTD Bantar	4. 
5	Ferdinal Asim	Sehdia	5. 
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 0751.7056335 Fax.0751.7055676

NOTULEN RAPAT

Kepada : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Bidang EKO SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tanggal : 31 Mei 2024
Perihal : Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Jumat 31 Mei 2024 Ruang Rapat Lt. I Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dasar	: Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024
Pimpinan Rapat	: Kepala Bidang EKOSDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	: - Dinas Pertanian dan Perkebunan Hortikultura - Fungsional dan Staf Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat - Inspektorat - BPKD - Biro Organisasi - Biro PBJ
Agenda Rapat	: Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
Pembahasan Renja 2025	: Dinas Pertanian dan Perkebunan Hortikultura Sekretariat <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Catatan : 50.000.000 usulan penambahan dipertimbangkan• Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Catatan : 50.000.000 usulan penambahan dipertimbangkan• Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Catatan : sesuaikan dgn sub kegiatan, untuk baliho pindah ke logistik• Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Catatan : 282.074.850 penambahan untuk pembayaran keuangan tagihan listrik pabik kinali• Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : ok• Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Catatan : 100.000.000 usulan penambahan dipertimbangkan UPTD BP3 <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Catatan (6,440,000) Penyesuaian harga satuan Belanja Honorarium

	<p>Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan pemindahan belanja penganggandaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Catatan : 11.960.000 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : 44.482.750 penabahan Dalam rangka peningkatan PAD, maka perlu dilengkapi prasarana asrama UPTD BPPPP Bukittinggi karena pada tahun ini retribusinya naik namun fasilitas perlengkapan mandi tidak tersedia, sehingga banyak yang enggan untuk menginap di asrama • Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Catatan : 624,460.000,- Penambahan pada biaya listrik dan air. Dan dijadikannya Asrama UPTD BP3 Bukittinggi sebagai tempat penampungan pengungsi korban bencana galodo dan trauma healing • Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : 25,560.000,- Penambahan untuk biaya jasa pemeliharaan AC, CCTV, komputer dan printer. Pada APBD awal tidak mencukupinya biaya untuk pemeliharaan peralatan tersebut, yang tersedianya hanya untuk AC sebanyak 16 unit • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : 139,452,878 Penambahan untuk kekurangan gaji Outsourcing, seragam dan bahan kebersihan serta tenaga administrasi • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : 36.400.000 Penambahan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4. Pada APBD awal hanya tersedia untuk 0,9 unit, sementara kendaraan dinas yang akan dipelihara sebanyak 2 unit • Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : 2.250.000,- Belanja untuk Oli mesin genset dan hidrant • Kegiatan : Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian Catatan : 14.000.000,- Kebutuhan biaya operasional untuk penilaian ke Kabupaten/Kota • Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Catatan : 14.000.000,- Pemindahan anggaran untuk operasional penilaian kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian tingkat provinsi • Kegiatan : Jambore Penyuluh Pertanian Provinsi Sumatera Barat Catatan : 1,102.989.000,- Peningkatan kapasitas SDM penyuluh pertanian dan penerapan metode penyuluhan pertanian melalui temu <p>UPTD BP2MB PTP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Catatan : (12,760.000) menyesuaikan dengan pagu UPTD dan per • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : 12,228,200 menyesuaikan dengan kebutuhan (ATK bbrp sub keg pindah ke sub keg ini) • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan : 1,475,000,- menyesuaikan dengan kebutuhan UPTD BP2MB PTP
--	---

- Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Catatan : 11,575.000,- 1. penambahan anggaran air, listrik, telpon dan internet untuk kantor (siteba dan gadut) serta asrama (gadut) agar dapat mengcover kebutuhan UPTD BP2MB PTP selama 1 tahun. 2. Menyesuaikan dengan kebutuhan UPTD BP2MB PTP.
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Catatan : 11.390.000,- menyesuaikan dengan kebutuhan UPTD BP2MB PTP
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Catatan : 157.143.290,- 1. penambahan jasa tenaga kebersihan, keamanan dan sopir dari 9 bulan + thr menjadi 12 bulan, untuk tenaga keamanan di tambah 1 orang lagi (penempatan gadut, krn areal cukup luas) terdapat kantor dan asrama. pengadaan baju seragam non asn (utk tenaga kebersihan. Keamanan dan sopir), penambahan tenaga administrasi 3 orang, dan instruktur senam. 2. Menyesuaikan dengan kebutuhan UPTD BP2MB PTP
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Catatan : 4,500.000,- menyesuaikan dengan kebutuhan UPTD BP2MB PTP
- Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Catatan : 28.760.000,- menyesuaikan dengan kebutuhan UPTD BP2MB PTP
- Kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Catatan : 50.000.000,- '1. Pemeliharaan Kebun Induk Gambir di Kab. Lima Puluh Kota. 2. Penyesuaian tolok ukur dan target kinerja.
- Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
Catatan : 8.000.000,- pembuatan plang nama UPTD untuk kantor (siteba dan gadut), karena sejak perubahan nomenklatur UPTD belum diusulkan pembaruan

UPTD BBI TPHP

- Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Catatan : 840.000,- Kekurangan Honor Bendahara Penerima
- Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Catatan : 785.000,- Kebutuhan Peralatan Listrik untk gedung kantor & menghilangkan mesin pres listrik
- Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Catatan : 37,320,871,- perjalanan dinas unruk satgas BBI Kabupaten ke BBI Lubuk Minturun
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Catatan :83.994.000,- Kekurangan Listrik & Air untuk satu tahun
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Catatan :2.440.000,- penamabahan Kekurangan biaya perbaikan AC
- Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
Catatan : 251,057,985,- arahan pimpinan untuk menambah bantuan benih jagung, buah-buahan dan sayuran bagi masyarakat, dan untuk biaya operasional labor kultur jaringan yang sebelumnya tidak ada sama sekali serta menjalankan salah satu tupoksi BBI sebagai pembina penangkar benih

tanaman pangan dan hortikultura

UPTD BPSB TPH

- Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Catatan : 6,750.000,- Kelebihan Dana Pakaian Dinas
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Catatan : 92,400.000,- Penambahan Kekurangan Kebutuhan Listrik dan Sumber Daya Air selama 1 Tahun (12 Bulan)
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Catatan : 554.102.489,- Penambahan Kekurangan Kebutuhan Jasa Outsorsing sebanyak 13 Bulan
- Kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Catatan : Jumlah Sertifikat Benih yang dihasilkan setiap tahun Rata2 300 Sertifikat

UPTD BTPPH

- Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Catatan : 20.560.000,- Pengurusan status kepemilikan aset UPTD BTPPH di kab/kota
- Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Catatan :(7.500.000) Sisa Pengadaan
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Catatan : 9.750.000,- Penambahan biaya tagihan telpon dan listrik
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Catatan : 53.055.000,- penambahan atas kekurangan gaji tenaga ousourcing
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Catatan :19.100.000,- untuk biaya KIR pajak kendaraan roda 4 sebanyak 7 unit
- Kegiatan : Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
Catatan : 120.000.000,- Fasilitasi kegiatan Satgas Organik yang tidak terakomodir pada pagu 2024
- Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Catatan : 63.690.000,- Penambahan Kegiatan : Temu Teknis Penyusunan Managemen Mutu ISO : 17025 : 2017 dan Koordinasi POPT Lingkup BTPPH.212.809.520,- Pembelian bahan pengendalian OPT, penambahan volume gerakan pengendalian, penambahan volume BBM dan perjadin.
- Kegiatan : Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Catatan : 229.341.765,- Penyediaan sarana safety untuk petugas lapang (rompi, jas hujan, topi, boots), penyediaan sarana penguat tubuh untuk petugas (vitamin B Complex, Vit C, susu), penambahan unit gerakan pengendalian, penambahan volume BBM dan perjadin.
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Catatan : 35.080.406,- kebutuhan tidak mencukupi 12 bulan

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan :5.500.000,- sub kegiatan baru pengadaan Printer 2 unit • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : 164.463.195,- Penambahan tenaga outsourcing, kekurangan jumlah honor dan penambahan belanja jasa tenaga adminisgtrasi • Kegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Catatan : 523.000.000,- Pengalihan pikir ke OPD lain an. Daswipetra dan Budiman serta pengalihan lingkup OPD an. Mario Syah Johan, Firdaus dan Arkadius • Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani Catatan : 316.657.625,- Pengalihan pikir ke OPD lain (a.n. Budiman) dan penabahan anggaran hutang jangka pendek 2023 • Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Catatan : Perubahan nama paket perencanaan dan pengawasan • Kegiatan : Brigade Alsintan Catatan : 200.000.000,- adanya Bencana Alam Banjir Lahar Dingin. Banjir Bandang dan Longsor di Provinsi Sumatera Barat
Dokumentasi	
Penutup	: Demikian disampaikan, terima kasih.

Notulis,

 Rosalinda

2.2.2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Verifikasi rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Pertanian.

Verifikasi terhadap Perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat
2. Hasil verifikasi rancangan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 dapat dilihat pada matrik hasil dan notulen rapat verifikasi sebagaimana terlampir.



BERITA ACARA

PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 50 /V/Eko-SDA/Bappeda-2024

Dasar pelaksanaan kegiatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4003/Bangda Tanggal 14 September 2021, Dirjen Bina Bangda selaku Ketua Pokja pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah telah menyampaikan rancangan pemutakhiran perencanaan pembangunan daerah untuk dikompilasi bersama-sama dengan urusan lain untuk dilakukan pemutakhiran
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 84, 134, 352, 362, mengamanatkan bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 untuk disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024.
9. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

Pelaksanaan Kegiatan :

Hari / Tanggal : Selasa / 28 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Objek Verifikasi :

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) **Perubahan tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
2. Melaksanakan Urusan/Fungsi **Pertanian**

Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 :

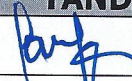

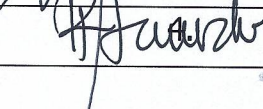
1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama dengan Perangkat Daerah **telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja Perubahan Tahun 2024** sebagaimana daftar hadir pada **lampiran 1 Berita Acara ini**.
2. **Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani** terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang terdiri dari Permasalahan 2016-2021, Isu Strategi 2021-2026, Tujuan 2021-2026, Sasaran 2021-2026, Indikator Kinerja Sasaran 2021-2026, Strategi 2021-2026, Arah Kebijakan 2021-2026, Program 2021-2021 dan Indikator Kinerja Program 2021-2021, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. **Penjelasan terkait dengan Point 2 diatas sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 yakni sebagai berikut :**
 - a. **Permasalahan Pembangunan** adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
 - b. **Isu Strategis** adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
 - c. **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
 - d. **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
 - e. **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 - f. **Arah Kebijakan** adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 - g. **Program Pembangunan Daerah** adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, yang mengacu kepada Program yang tertuang dalam Permendagri 90 Tahun 2019.





- h. **Indikator Kinerja** adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil verifikasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Febriana 2014

LAMPIRAN 1 : DAFTAR HADIR

TIM VERIFIKASI			
NO	NAMA	SKPD	TANDATANGAN
1	Benny S	Bappeda	1. 
2			2.
3	Devi-anh	Bappeda	3. 
4	Rosalinda	Bappeda	4. 
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.

PERANGKAT DAERAH YANG DIBAHAS :			
No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Epul Kavri	Kabid	1. 
2	Rika Merdekawati	Perencana	2. 
3	Benny Roberto	UPTD RTH	3. 
4	Deflexar	ka.UPTD.	4. 
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Tagging														Keterangan	
					Mendukung g PN	Progul	SPM	Stunting	Kemiskina n	DAK	USULAN	Mandatori Pusat	Direktif	Menduku ng IKU	Mendukung IKD	Penunjang Urusan Pem	IPP	Mendukung Disabilitas		Mendukung Program SAKIP
3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	0	0	0																
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	410.000.000	0	410.000.000																
3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	205.000.000	0	205.000.000																
3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	205.000.000	0	205.000.000																
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	313.515.890	0	313.515.890																
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	0	100.000.000																
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	100.000.000	0	100.000.000																
3.27.06.1.02	Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	213.515.890	0	213.515.890																
3.27.06.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	213.515.890	0	213.515.890																
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.568.829.900	0	1.568.829.900																
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	168.829.900	0	168.829.900																
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	168.829.900	0	168.829.900																
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.000.000.000	0	1.000.000.000																
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1.000.000.000	0	1.000.000.000																
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	400.000.000	0	400.000.000																
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	100.000.000	0	100.000.000																
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	300.000.000	0	300.000.000																

Pembahas (Bappeda)

Perwakilan
SKPD



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 0751.7056335 Fax.0751.7055676

NOTULEN RAPAT

Kepada : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Bidang EKO SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tanggal : 28 Mei 2024
Perihal : Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	:	Selasa 28 Mei 2024 Ruang Rapat Lt. I Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dasar	:	Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang EKOSDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	:	- Dinas peternakan - Fungsional dan Staf Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat - Inspektorat - BPKD - Biro Organisasi - Biro PBJ
Agenda Rapat	:	Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
Pembahasan Renja 2025	:	Bappeda <ul style="list-style-type: none">• Memastikan bahwa penyusunan program kegiatan indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat telah sesuai dgn target sasaran dan prioritas pembangunan daerah (indikator kinerja Utama dan indikator Kinerja daerah)• Tindak lanjut terhadap hasil reuiu inspektorat terhadap laporan Kinerja Instansi pemerintah daerah Tahun 2023• Penyesuaian cascading pada masing-masing perangkat daerah• Rasionalisasi anggaran pada DPA Ztahun 2024• Memastikan penyusunan belanja pada masing-masing sub kegiatan telah sesuai dgn surat Gubernur Sumatera Barat nomor 030/237.a/BPKAD-pAP/2024 tanggal 4 april 2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja Tahun anggaran 2024• Tindaklanjut Hasil Evaluasi BPKP terhadap belanja sub kegiatan penanganan kemiskinan dan stunting pada APBD Tahun 2024 Dinas Peternakan <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Catatan : 74.644.000 Penambahan Pelatihan untuk ASN di UTD terkait pelatihan pengambilan contoh di BSN tangerang (BSN) untuk 3 orang, pelatihan analisis kuantitatif 4 orang, termasuk kontribusi• Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Catatan : 210.210.000 Penambahan anggaran perjalanan dinas luar provinsi


	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : 286.320.200 Penambahan Laptop dan printer • Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Catatan : 443.453.000 Pengadaaan vidotron indoor, dipindahkan ke sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya • Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Catatan : 187.250.000 Pemindahan rincian belanja dari sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya • Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Catatan : 303.106.000 penambahan pakan itik (kurang 6 bulan lagi) ; usulan perubahan standar harga pakan ; penambahan item rincian (tidak menambah anggaran) • Kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Catatan : perpindahan sewa kendaraan sebesar 10.200.000 ke PD • Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Catatan : perubahan kode rekening (rencana dan pengawasan) • Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Catatan : 270.478.750 penambahan bahan pakan • Kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Catatan : geser di dalam • Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Catatan : 5.926.000 penambahan PD • Kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Catatan : 99.360.000 Penambahan sewa transportasi ternak dari denpasar (ekspedisi) • Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Catatan : 19.360.000 Penambahan perbaikan pagar di sekeliling UPTD di Payakumbuh • Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Catatan : 4.837.500 penambahan pembelian bola lampu untuk ruang poli, rawat inap dan operasi • Kegiatan : Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik
--	---

		<p>Hewan Catatan : 668.765.613 penambahan alat rongten 1 buah karena sudah rusak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Catatan : 167.249.085penambahan belanja bahan kimia dan belanja modal alat laboratorium; pembelian laptop 1 dan printer 1 • Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Catatan : 15.587.000 penambahan anggaran beli becak motor karena spek tidak sesuai
Penutup	:	Demikian disampaikan, terima kasih.

Dokumentasi :



Notulis,


Rosalinda

2.2.3. Dinas Pangan

Verifikasi rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pangan Tahun 2024 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Pertanian.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 :

3. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat
4. Hasil verifikasi rancangan Perubahan Renja Dinas Pangan tahun 2024 dapat dilihat pada matrik dan notulen rapat hasil verifikasi sebagaimana terlampir.



BERITA ACARA

PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 36 /V/Eko-SDA/Bappeda-2024

Dasar pelaksanaan kegiatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4003/Bangda Tanggal 14 September 2021, Dirjen Bina Bangda selaku Ketua Pokja pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah telah menyampaikan rancangan pemutakhiran perencanaan pembangunan daerah untuk dikompilasi bersama-sama dengan urusan lain untuk dilakukan pemutakhiran
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 84, 134, 352, 362, mengamanatkan bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 untuk disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024.
9. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

Pelaksanaan Kegiatan :

Hari / Tanggal : Rabu / 15 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Objek Verifikasi :

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) **Perubahan tahun 2024 Dinas Pangan**
2. Melaksanakan Urusan/Fungsi **Pertanian**

Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 :

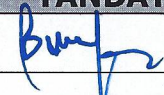
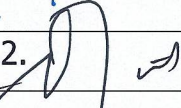

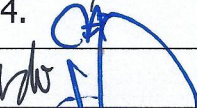
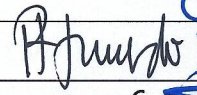

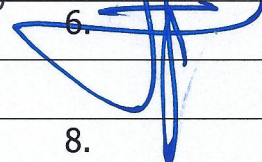
1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama dengan Perangkat Daerah **telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja Perubahan Tahun 2024** sebagaimana daftar hadir pada **lampiran 1 Berita Acara ini**.
2. **Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani** terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang terdiri dari Permasalahan 2016-2021, Isu Strategi 2021-2026, Tujuan 2021-2026, Sasaran 2021-2026, Indikator Kinerja Sasaran 2021-2026, Strategi 2021-2026, Arah Kebijakan 2021-2026, Program 2021-2021 dan Indikator Kinerja Program 2021-2021, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. **Penjelasan terkait dengan Point 2 diatas sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 yakni sebagai berikut :**
 - a. **Permasalahan Pembangunan** adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
 - b. **Isu Strategis** adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
 - c. **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
 - d. **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
 - e. **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 - f. **Arah Kebijakan** adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 - g. **Program Pembangunan Daerah** adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, yang mengacu kepada Program yang tertuang dalam Permendagri 90 Tahun 2019.

- h. **Indikator Kinerja** adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact)



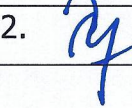
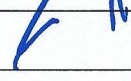
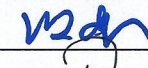

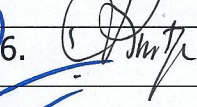
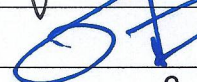
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil verifikasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangan 2024

LAMPIRAN 1 : DAFTAR HADIR

TIM VERIFIKASI			
NO	NAMA	SKPD	TANDATANGAN
1	Benny S	Bappeda	1. 
2	Bevi-yanti	Bappeda	2. 
3	Muelwid K	Bappeda	3. 
4	Steffi Amanda	Bappeda	4. 
5	Rosalinda	Bappeda	5. 
6	Tedd. Rappanti		6. 
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.

PERANGKAT DAERAH YANG DIBAHAS :

No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Nonien Juni	Diras Pangan	1. 
2	Murni Furniahy		2. 
3	Bayu Lubo	Diras Pangan	3. 
4	Syaf m d l m	- II -	4. 
5	Rahmawati Koto	AKP	5. 
6	Derry Swasti	ka. bid keamanan Pgn.	6. 
7	AZMI BOY	AKP	7. 
8			8.
9			9.
10			10.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 0751.7056335 Fax.0751.7055676

NOTULEN RAPAT

Kepada : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Bidang EKO SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tanggal : 31 Mei 2024
Perihal : Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Jumat 31 Mei 2024 Ruang Rapat Lt. I Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dasar	: Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024
Pimpinan Rapat	: Kepala Bidang EKOSDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	: - Dinas Pangan - Fungsional dan Staf Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat - Inspektorat - BPKD - Biro Organisasi - Biro PBJ
Agenda Rapat	: Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
Pembahasan Renja 2025	: Dinas Pangan Sekretariat <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan : pengamanan barang milik daerah Catatan : 6.000.000 penambahan pengurusan adm rumah dinas• Kegiatan : pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Perangkat daerah Catatan : -4. 642.000,- penyesuain honor KPA, PA sesuai Pergub• Kegiatan : pemeliharaan/peralatan mesin lainnya Catatan : 40.230.000 sub kegiatan di DPA ada, tp anggarannya nol, sekarang dimunculkan lagi• Kegiatan : rekomendasi keamanan Catatan : 3.990.000 perubahan standar biaya pengujian dan menambah sampel uji• Kegiatan : penguatan kelembagaan pengawasan Catatan : -3. 256.000 pengurangan makan minum, pengurangan honor narasumber, dialihkan ke pembuatan booklet• Kegiatan: koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok Catatan : -39.000.100, pengurangan makan minum, pengurangan BBM, pengurangan jasa iklan, pengurangan perjalanan dinas• Kegiatan : stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen, Catatan : 8.115.000 kegiatan GPM tidak terlaksana karena sudah teranggarkan di APBN --> pengurangan makan minum rapat, sewa tenda,

	<p>dialihkan ke cetak (tambah kode rekening dan BBM operasional)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen Catatan : -18.846.000,- penyesuaian makan minum rapat, honor narasumber --> anggaran sudah dibantu APBN (apresiasi dan sudah dilaksanakan di bulan maret, dan ada penggabungan rapat (HBKN dan evaluasi harga pangan) -- narasumber hilang, transport hilang • Kegiatan : Penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi Catatan : 117.846.000 penambahan sewa truk (tersedia 34 truk, pemakaian s/d saat ini sudah 77 truk, penambahan perjalanan dinas untuk penyaluran • Kegiatan : APN Catatan : -359.271.700,-kekurangan penganggaran untuk hari Adhikarya (eo, lomba) • Kegiatan : Penyediaan Pangan berbasis sumber daya lokal Catatan : 201.245.000 pikir maigusnasir, hibah, ada kelompok tani dan KWT yang tidak aktif lagi. Awal 103. sekarang 97. rempah 27 jadi 25. KRPL 76 jadi 72 dialihkan ke biaya publikasi penambahan untuk honor • Kegiatan : PPH Catatan : biaya penginapan narsum dialihkan ke cetak • Kegiatan : pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal Catatan : - 617,456,000 pengurangan kelompok tani 21 menjadi 6 kelompok (ternyata kebanyakan usaha pribadi) • Kegiatan : koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi Catatan : 42.000.000 penambahan untuk membuat local food corner di kantor, untuk memajang hasil pangan kelompok, penambahan pengadaan speaker aktif (1) --> pastikan sudah tercatat dalam RKPBM • Kegiatan : pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor Catatan : -32.893.995 pengurangan belanja air dialihkan ke perjalanan dinas untuk sertifikasi belanja sarana prasarana lab salah input kode rekening untuk pemeliharaan gedung (tadinya untuk nama dialihkan untuk pemeliharaan gedung)
Dokumentasi	<p>:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
Penutup	<p>: Demikian disampaikan, terima kasih.</p>

Notulis,



Rosalinda

2.2.4. Dinas Kelautan dan Perikanan

Verifikasi rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Verifikasi terhadap Perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 :

3. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat
4. Hasil verifikasi rancangan Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dapat dilihat pada matrik dan notulen rapat hasil verifikasi sebagaimana terlampir.



BERITA ACARA

PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 52 /V/Eko-SDA/Bappeda-2024

Dasar pelaksanaan kegiatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4003/Bangda Tanggal 14 September 2021, Dirjen Bina Bangda selaku Ketua Pokja pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah telah menyampaikan rancangan pemutakhiran perencanaan pembangunan daerah untuk dikompilasi bersama-sama dengan urusan lain untuk dilakukan pemutakhiran
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 84, 134, 352, 362, mengamanatkan bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 untuk disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024.
9. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

Pelaksanaan Kegiatan :

Hari / Tanggal : Rabu / 29 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Objek Verifikasi :

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) **Perubahan tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan**
2. Melaksanakan Urusan/Fungsi **Kelautan dan Perikanan**

Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama dengan Perangkat Daerah **telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja Perubahan Tahun 2024** sebagaimana daftar hadir pada **lampiran 1 Berita Acara ini**.
2. **Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani** terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang terdiri dari Permasalahan 2016-2021, Isu Strategi 2021-2026, Tujuan 2021-2026, Sasaran 2021-2026, Indikator Kinerja Sasaran 2021-2026, Strategi 2021-2026, Arah Kebijakan 2021-2026, Program 2021-2021 dan Indikator Kinerja Program 2021-2021, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. **Penjelasan terkait dengan Point 2 diatas sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 yakni sebagai berikut :**
 - a. **Permasalahan Pembangunan** adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
 - b. **Isu Strategis** adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
 - c. **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
 - d. **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
 - e. **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 - f. **Arah Kebijakan** adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 - g. **Program Pembangunan Daerah** adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, yang mengacu kepada Program yang tertuang dalam Permendagri 90 Tahun 2019.

- h. **Indikator Kinerja** adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil verifikasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1 : DAFTAR HADIR

DKP 2014

TIM VERIFIKASI			
NO	NAMA	SKPD	TANDATANGAN
1	Benny S	Bappenas	1.
2	Ade Redha Utami	Biro Organisasi	2.
3	Devyanis	Bappeda	3.
4			4.
5	Steph Aminda	Bappeda	5.
6	Posa Linda	Bappeda	
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
PERANGKAT DAERAH YANG DIBAHAS :			
No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Resi Suriati	Setretaris	1.
2	Yossy Novita	JF Perencanaan	2.
3	Lastri Mulyanti	Ka. UPTD BBALP	3.
4	I R W A N	ka UPTD Jember	4.
5	Sandy Waldi	Kabid. PDSKP	5.
6	YOPRIANSO	ka UPTD PPPW III	6.
7	Fella Madhana	Kabid tglp	7.
8			8.
9			9.
10			10.

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Su- b Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Tagging														Keterangan		
					Mendukung PN	Progul	SPM	Stunting	Kemiskina n	DAK	USULAN	Mandatori Pusat	Direktif	Mendukung IKU	Mendukung IKD	Penunjang Urusan Pem	IPP	Mendukung Disabilitas		Mendukung Program SAKIP	
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	967.113.950	0	967.113.950																	
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.335.814.000	0	1.335.814.000																	
3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.335.814.000	0	1.335.814.000																	

Pembahas (Bappeda)

Perwakilan SKPD

2.2.5. Dinas Kehutanan

Verifikasi rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kehutanan Tahun 2024 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Verifikasi terhadap Perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 :

3. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat
4. Hasil verifikasi Perubahan rancangan Renja Dinas Kehutanan tahun 2024 dapat dilihat pada matrik dan notulen rapat hasil verifikasi sebagaimana terlampir.



BERITA ACARA

PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 44 /V/Eko-SDA/Bappeda-2024

Dasar pelaksanaan kegiatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4003/Bangda Tanggal 14 September 2021, Dirjen Bina Bangda selaku Ketua Pokja pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah telah menyampaikan rancangan pemutakhiran perencanaan pembangunan daerah untuk dikompilasi bersama-sama dengan urusan lain untuk dilakukan pemutakhiran
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 84, 134, 352, 362, mengamanatkan bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 untuk disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024.
9. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

Pelaksanaan Kegiatan :

Hari / Tanggal : Selasa / 21 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Objek Verifikasi :

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) **Perubahan tahun 2024 Dinas Kehutanan**
2. Melaksanakan Urusan/Fungsi **Kehutanan**

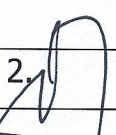
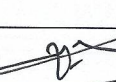

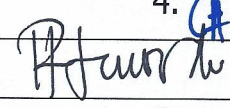
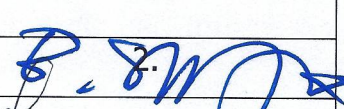
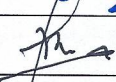
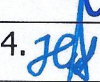
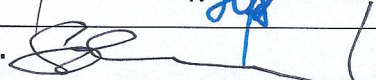
Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama dengan Perangkat Daerah **telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja Perubahan Tahun 2024** sebagaimana daftar hadir pada **lampiran 1 Berita Acara ini**.
2. **Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani** terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang terdiri dari Permasalahan 2016-2021, Isu Strategi 2021-2026, Tujuan 2021-2026, Sasaran 2021-2026, Indikator Kinerja Sasaran 2021-2026, Strategi 2021-2026, Arah Kebijakan 2021-2026, Program 2021-2021 dan Indikator Kinerja Program 2021-2021, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. **Penjelasan terkait dengan Point 2 diatas sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 yakni sebagai berikut :**
 - a. **Permasalahan Pembangunan** adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
 - b. **Isu Strategis** adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
 - c. **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
 - d. **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
 - e. **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 - f. **Arah Kebijakan** adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 - g. **Program Pembangunan Daerah** adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, yang mengacu kepada Program yang tertuang dalam Permendagri 90 Tahun 2019.

- h. **Indikator Kinerja** adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil verifikasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1 : DAFTAR HADIR

TIM VERIFIKASI			
NO	NAMA	SKPD	TANDATANGAN
1			1.
2	Deviant	Bappeda	2. 
3	Hendro K	Bappeda	3. 
4	Stella Amanda	Bappeda	4. 
5	Rosalinda	Bappeda	5. 
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
PERANGKAT DAERAH YANG DIBAHAS :			
No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1			1.
2	Bambang Soxono	Kabid PDAS RHL	2. 
3	Sayogo Hutomo	Kabid PRPN	3. 
4	Hendrio Fadly	KaUPTD Korp Perairi Selah	4. 
5	Syamsul	KKRPHL BB	5. 
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Tagging														Keterangan		
					Mendukung PN	Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	USULAN	Mandatori Pusat	Direktif	Mendukung IKU	Mendukung IKD	Penunjang Urusan Pem	IPP	Mendukung Disabilitas		Mendukung Program SAKIP	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	460.000.000	0	460.000.000																	
3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	300.000.000	0	300.000.000																	
3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	80.000.000	0	80.000.000																	
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	80.000.000	0	80.000.000																	

Pembahas (Bappeda)

Perwakilan
SKPD



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 0751.7056335 Fax.0751.7055676

NOTULEN RAPAT


Kepada : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Bidang EKO SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tanggal : 31 Mei 2024
Perihal : Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: : Jumat 31 Mei 2024 Ruang Rapat Lt. I Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dasar	: Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024
Pimpinan Rapat	: Kepala Bidang EKOSDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	: - Dinas Kehutanan - Fungsional dan Staf Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat - Inspektorat - BPKD - Biro Organisasi - Biro PBJ
Agenda Rapat	: Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Perubahan Tahun 2024
Pembahasan Renja 2025	: Dinas Kehutanan <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Catatan : 636.379.344 penambahan karena tahun 2024 terdapat pembayaran tpp dan tpp 13 sebesar 100% dan hutan tpp kph mentawai tahun 2023 sehingga anggaran tidak cukup sampai desember 2024• Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Catatan : 98.000.000,- penambahan KARENA ADA HONOR pptk• Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Catatan : (400.662.000,-) pengurangan terhadap biaya kontribusi diklat• Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Catatan : 5.038.900 penambahan pengadaan infocus• Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Catatan : 52.942.000,- penambahan pengadaan infocus• Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Catatan : (8.319.920) Merubah jenis-jenis BMD yang diadakan• Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : (39.277.835) pengurangan jumlah tenaga sopir• Kegiatan : Penyediaa Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Catatan : 147.500.000 , penambahan biaya pemeliharaan kendaraan

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan Catatan : 1. Tagging sumber dana DAU untuk mencukupi menjadi 300 juta 2. Menghilangkan kegiatan jambore untuk menambah BBM dan penambahan dana penggantian transport workshop perhutanan sosial 3. Menambah perjadin survey pendapatan petani hutan • Kegiatan : Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Catatan : 1. Menambah dana untuk penggantian transport kelompok tani hutan 2. Menambah perjalanan dinas luar provinsi • Kegiatan : Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Catatan : Karena belum terakomodirnya Kebutuhan bahan dan alat peraga kampanye dan publikasi untuk percepatan akses kelola hutan oleh masyarakat luas berupa photobook yg mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kehutanan Prov. sumbar • Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Catatan : (9.000.000) terdapat sisa Kontrak • Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Catatan : Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Catatan : (13.500.000) Penyesuaian dan rasionalisasi volume rincian belanja • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : (153.612.168) Penyesuaian dan rasionalisasi volume rincian belanja serta terdapat sisa kontrak • Kegiatan : Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 8 Usulan Pokir Catatan : Penyesuaian rincian belanja • Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Catatan : (4.974.000) sisa belanja • Kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Catatan : penyesuaian belanja dalam rekening kegiatan • Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Catatan : perubahan nomenklatur belanja BBM • Kegiatan : Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 2 Usulan Pokir Catatan : Menghilangkan rekening belanja bimtek diganti dengan menambah • Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Catatan : perubahan harga satuan • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan : perubahan harga satuan • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Catatan : perubahan harga satuan • Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Catatan : 6.183.013 penambahan belanja air dan listrik
--	---

- Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Catatan : (17.835.128) sisa kontrak
- Kegiatan : Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
Catatan : pergeseran belanja antar rekening
- Kegiatan : Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 8 Usulan Pokir
Catatan : (39.560.000) Perubahan jenis Alat Ekonomi Produktif
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Catatan : (27.307.00) dititipkan di subbag umpeg dinas untuk pembelian laptop dan printer
- Kegiatan : Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 8 Usulan Pokir
Catatan : penyesuaian belanja dalam rekening kegiatan
- Kegiatan : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Catatan : (18.459.600) Uang tersebut dititipkan ke subag bagian umum dan kepegawaian (Dinas Induk) karena belanja modal
- Kegiatan : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan
Catatan : penyesuaian kekurangan dana DBH sawit serta penyesuai belanja lainnya
- Kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
Catatan : penyesuaian belanja penggandaan
- Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
Catatan : penyesuaian belanja penggandaan
- Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Catatan : penyesuaian belanja penggandaan
- Kegiatan : Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 8 Usulan Pokir
Catatan : penyesuaian belanja penyediaan alat jamur
- Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Catatan : (10.500.000) Penyesuaian anggaran dengan item pekerjaan yang akan dilaksanakan dan pergeseran pelaksanaan anggaran kas
- Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Catatan : (2.040.000) Harga beli koran nasional tidak sesuai standar SIPD dan naik
- Kegiatan : Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 2 Usulan Pokir
Catatan : penyesuaian output belanja kegiatan
- Kegiatan : Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 8 Usulan Pokir
Catatan : (19.481.800) Penyesuaian beberapa angagran dengan item pekerjaan yang akan dilaksanakan
- Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Catatan : 12.577.000 menambah belanja perjadin, makan dan minum serta belanja cetak

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Catatan : 5.490.900 menambah belanja perjadin, cetak dan atk • Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Catatan : 2. 508.936 menambah belanja perjadin dan bbm • Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Catatan : (6.160.000) sisa kontrak • Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Catatan : penyesuaian standar belanja penggandaan • Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Catatan : (13.580.436) penyesuaian belanja • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : (2.904.825) Sisa kontrak untuk menambah perjadin • Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Catatan : (210.000) sisa kontrak • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : (2.000.000) sisa mati • Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Catatan : (99.590) sisa kontrak • Kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Catatan : penyesuaian narasi output dan outcome kegiatan • Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Catatan : penyesuaian narasi output dan outcome kegiatan • Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Catatan : penyesuaian narasi output dan outcome kegiatan • Kegiatan : Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 2 Usulan Pokir Catatan : penyesuaian narasi output dan outcome kegiatan • Kegiatan : Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 8 Usulan Pokir Catatan : (75.353.043) <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian belanja cetak 2. sisa belanja pengadaan barang 3. Penyesuaian belanja makan dan minum 4. Penyesuaian belanja pakaian 5. Penyesuaian belanja honorarium narasumber 6. efisiensi perjadin • Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Catatan : 3.000.000,- Penyesuaian jumlah volume sesuai jumlah ASN di KPHP Mentawai • Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Catatan : (840.000) efisiensi belanja • Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
--	--

		<p>Catatan : (3.762.796) Pengurangan tagihan air karena belum ada PDAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Catatan : Pengurangan jumlah volume yang direncanakan untuk 2 Unit KPH (Unit XI dan Unit XII) menjadi 1 Unit (Unit XI) • Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Catatan : Penambahan belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawas
Dokumentasi	:	
Penutup	:	Demikian disampaikan, terima kasih.

Notulis,

Rosalinda

BAB III
VERIFIKASI USULAN DANA DAK FISIK
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

Verifikasi usulan dana DAK Kabupaten kota tahun 2025 lingkup Bidang Ekonomi dan SDA dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 bertempat di ruang rapat lantai 1 Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

a. Dasar pelaksanaan :

1. Surat Sekretaris Daerah Prov. Sumbar kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Nomor : 900.1.14.2/44/VII/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Undangan pelaksanaan verifikasi usulan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2025 Tahap II

b. Usulan Kabupaten/Kota yang diverifikasi :

1. Kabupaten Solok
2. Kabupaten Kep. Mentawai
3. Kabupaten Padang Pariaman
4. Kabupaten Pasaman Barat

c. Tim Verifikasi :

1. Bappeda Prov. Sumbar
2. Inspektorat Provinsi Sumbar
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Prov. Sumbar
4. Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Sumbar
5. OPD teknis Prov. Sumbar

d. Pimpinan rapat verifikasi :

1. Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Prov. Sumbar
2. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA

Hasil Rapat :

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2024, bahwa pengalokasian DAK Fisik Tahun 2025 dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan

2. prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. DAK Fisik untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar.
 - b. DAK Fisik Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu.
 - c. DAK Fisik Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
 - d. DAK Fisik Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
3. Berdasarkan timeline pengusulan DAK Tahun 2025, bahwa Pemerintah Provinsi (yang terdiri unsur Bappeda, BPKAD, Biro Pembangunan, Inspektorat dan Perangkat Daerah teknis) diminta untuk melakukan verifikasi terhadap usulan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2025 dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Verifikasi usulan tahap I pada tanggal tanggal 22-26 Juli 2024
 - b. Verifikasi usulan tahap II pada tanggal 1-6 Agustus 2024
4. Khusus pelaksanaan verifikasi usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota tahun 2024 lingkup Bidang Ekonomi dan SDA terdapat pada kelompok Pangan Pertanian dan Pangan Akuatik :

Kabupaten/kota pengusul :

 - a. Kabupaten Solok
 - Kelompok pangan pertanian
 - b. Kabupaten Kep. Mentawai
 - Kelompok pangan akuatik
 - c. Kabupaten Padang Pariaman
 - Kelompok pangan akuatik
 - d. Kabupaten Pasaman Barat
 - Kelompok pangan peetanian
5. Hasil dari verifikasi pembahasan usulan DAK kab.kota tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran laporan ini

I. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara umum usulan DAK fisik Kabupaten/Kota tahun 2025 dapat diterima dan diteruskan untuk diverifikasi oleh Tim Pusat dengan beberapa catatan untuk penyempurnaan dari usulan tersebut.

Saran

Diharapkan kepada Kabupaten/Kota pengusul untuk dapat menindaklanjuti catatan-catatan pembahasan dan melengkapi kekurangan persyaratan usulannya

Verifikasi Usulan DAK tahun 2025 Kabupaten Solok :



Verifikasi Usulan DAK tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Mentawai :



Verifikasi Usulan DAK tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman :



Verifikasi Usulan DAK tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat :





BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN VERIFIKASI USULAN KEGIATAN DAK FISIK KABUPATEN/KOTA
KELOMPOK PANGAN PERTANIAN DAN PANGAN AQUATIK
Nomor : 86 /VIII/BA/Eko-SDA/Bappeda-2024

Pada hari ini , tanggal **Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Ruang Rapat lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah diselenggarakan Verifikasi **Usulan Kegiatan DAK Fisik Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025**, yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Provinsi yang terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, Inspektorat dan OPD teknis Provinsi melalui aplikasi Krisna DAK.

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan :

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang No.01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
5. Surat Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2025.
6. Tanggapan dan saran dari seluruh Tim Verifikasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Tahun 2025 terhadap Usulan Kegiatan DAK Fisik dari Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Verifikasi Usulan DAK Fisik Tahun 2025 sebagaimana terlampir.
7. Usulan dan data pendukung pada menu Krisna DAK Tahun 2025 sepenuhnya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang mengusulkan, maka :

MENYEPAKATI

KESATU: Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui DAK Fisik Tahun 2025 dari **Kabupaten Pasaman Barat** telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi.

KEDUA : Menyepakati hasil kesepakatan Verifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui DAK Fisik Tahun 2025 dari **Kabupaten Pasaman Barat** diteruskan ke Pemerintah Pusat melalui surat Rekomendasi Gubernur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :

BAPPEDA PROV. SUMATERA BARAT


HENDRICK KASMADIHARJA, S.TP, M.Si

BAPPEDA KABUPATEN
PASAMAN BARAT


SASMITA SIREGAR, SS, M.Eng

DINAS PERKEBUNUNAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORT. PROV. SUMBAR



SERLY DERANTI, SP

BPKAD PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

TREEVIEW


LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATAT
							PROV
bidang	`01	Pendidikan					
bidang	`02	Kesehatan dan KB					
bidang	`03	Konektivitas					
bidang	`08	Irigasi					
bidang	`09	Pangan Pertanian					
sub_bidang	`09.01	Pertanian - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)					
menu_kegiatan	`09.01.01	Pembangunan /Rehabilitasi Sumber-Sumber Air	penugasan				
rincian	`09.01.01.03	Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Irigasi	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
rincian	`09.01.01.04	Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
menu_kegiatan	`09.01.02	Jalan Pertanian	penugasan				
rincian	`09.01.02.01	Jalan Usaha Tani Hortikultura	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
rincian	`09.01.02.03	Jalan Produksi Perkebunan	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Perbaikan koordinat usulan Kecamatan Sungai Aua
menu_kegiatan	`09.01.05	Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	penugasan				

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATAT
							PROV
rincian	'09.01.05.01	Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
rincian	'09.01.05.02	Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Perbaikan koordinat untuk Renovasi BPP Kecamatan Kinali
menu_kegiatan	'09.01.08	Fasilitasi Revitalisasi RMU dan Prasarana Pendukungnya	penugasan				
rincian	'09.01.08.02	Husker Kap. Minimum 2 Ton/Jam	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Perbaikan koordinat usulan Kecamatan Kinali
rincian	'09.01.08.03	Polisher Kap. Minimum 2 Ton/Jam	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Perbaikan koordinat usulan Kecamatan Kinali
rincian	'09.01.08.05	Packing	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATAT
							PROV
rincian	'09.01.08.06	Flat Bed Dryer Kap. 5 Ton/proses	penugasan		Unit	ready	 <p>Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Perbaikan koordinat usulan Kecamatan Talamau</p>
rincian	'09.01.08.07	Bangunan Flat Bed Dryer	penugasan		Unit	ready	 <p>Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.</p>
rincian	'09.01.08.08	Bangunan Penyimpanan Beras Kap. 500 ton	penugasan		Unit	ready	 <p>Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Perbaikan koordinat usulan Kecamatan Talamau</p>

TREEVIEW

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATAT
							PROV
bidang	`01	Pendidikan					
bidang	`02	Kesehatan dan KB					
bidang	`03	Konektivitas					
bidang	`08	Irigasi					
bidang	`09	Pangan Pertanian					
sub_bidang	`09.01	Pertanian - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)					
menu_kegiatan	`09.01.01	Pembangunan /Rehabilitasi Sumber-Sumber Air	penugasan				
rincian	`09.01.01.03	Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Irigasi	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
rincian	`09.01.01.04	Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
menu_kegiatan	`09.01.02	Jalan Pertanian	penugasan				
rincian	`09.01.02.01	Jalan Usaha Tani Hortikultura	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
rincian	`09.01.02.03	Jalan Produksi Perkebunan	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Perbaikan koordinat usulan Kecamatan Sungai Aua
menu_kegiatan	`09.01.05	Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	penugasan				

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATAT
							PROV
rincian	'09.01.05.01	Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
rincian	'09.01.05.02	Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Perbaikan koordinat untuk Renovasi BPP Kecamatan Kinali
menu_kegiatan	'09.01.08	Fasilitasi Revitalisasi RMU dan Prasarana Pendukungnya	penugasan				
rincian	'09.01.08.02	Husker Kap. Minimum 2 Ton/Jam	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Perbaikan koordinat usulan Kecamatan Kinali
rincian	'09.01.08.03	Polisher Kap. Minimum 2 Ton/Jam	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Perbaikan koordinat usulan Kecamatan Kinali
rincian	'09.01.08.05	Packing	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATAT
							PROV
rincian	'09.01.08.06	Flat Bed Dryer Kap. 5 Ton/proses	penugasan		Unit	ready	 <p>Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Perbaikan koordinat usulan Kecamatan Talamau</p>
rincian	'09.01.08.07	Bangunan Flat Bed Dryer	penugasan		Unit	ready	 <p>Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.</p>
rincian	'09.01.08.08	Bangunan Penyimpanan Beras Kap. 500 ton	penugasan		Unit	ready	 <p>Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Perbaikan koordinat usulan Kecamatan Talamau</p>



BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN VERIFIKASI USULAN KEGIATAN DAK FISIK KABUPATEN/KOTA
KELOMPOK PANGAN PERTANIAN DAN PANGAN AQUATIK
Nomor : 88 /VIII/BA/Eko-SDA/Bappeda-2024

Pada hari ini , tanggal **Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Ruang Rapat lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah diselenggarakan Verifikasi **Usulan Kegiatan DAK Fisik Kabupaten Solok tahun 2025**, yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Provinsi yang terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, Inspektorat dan OPD teknis Provinsi melalui aplikasi Krisna DAK.

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan :

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang No.01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
5. Surat Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2025.
6. Tanggapan dan saran dari seluruh Tim Verifikasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Tahun 2025 terhadap Usulan Kegiatan DAK Fisik dari Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Verifikasi Usulan DAK Fisik Tahun 2025 sebagaimana terlampir.
7. Usulan dan data pendukung pada menu Krisna DAK Tahun 2025 sepenuhnya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang mengusulkan, maka :

MENYEPAKATI

KESATU: Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui DAK Fisik Tahun 2025 dari **Kabupaten Solok** telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi.

KEDUA : Menyepakati hasil kesepakatan Verifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui DAK Fisik Tahun 2025 dari **Kabupaten Solok** diteruskan ke Pemerintah Pusat melalui surat Rekomendasi Gubernur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :

BAPPEDA PROV. SUMATERA BARAT


HENDRICK KASMADIHARJA, S.TP, M.Si

BAPPEDA KABUPATEN SOLOK


ELMAWATI, SP, M.Si



DINAS PERKEBUNUNAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORT. PROV. SUMBAR


SERLY DERANTI, SP


DINAS PANGAN PROV. SUMBAR


AZMI BOY, SP, MP



TREEVIEW

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATAT
							PROV
bidang	`01	Pendidikan					
bidang	`02	Kesehatan dan KB					
bidang	`03	Konektivitas					
bidang	`04	Air Minum					
bidang	`05	Sanitasi					
bidang	`06	Perumahan dan Permukiman					
bidang	`08	Irigasi					
bidang	`09	Pangan Pertanian					
sub_bidang	`09.01	Pertanian - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)					
menu_kegiatan	`09.01.01	Pembangunan /Rehabilitasi Sumber-Sumber Air	penugasan				
rincian	`09.01.01.02	Pembangunan irigasi air tanah dalam	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
rincian	`09.01.01.04	Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
menu_kegiatan	`09.01.02	Jalan Pertanian	penugasan				
rincian	`09.01.02.01	Jalan Usaha Tani Hortikultura	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Perbaikan lokasi koordinat untuk usulan SARIAK ALAHAN TIGO
rincian	`09.01.02.02	Jalan Produksi Peternakan	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
menu_kegiatan	`09.01.05	Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	penugasan				


LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATAT
							PROV
rincian	'09.01.05.02	Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
menu_kegiatan	'09.01.06	Pembangunan screen house modern pengembangan hortikultura	penugasan				
rincian	'09.01.06.01	Pembangunan screen house modern pengembangan hortikultura komoditas sayuran	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
menu_kegiatan	'09.01.07	Bangsai Pasca Panen Komoditas Hortikultura dan sarana pendukungnya	penugasan				
rincian	'09.01.07.01	Bangsai Pasca Panen Komoditas Cabai dan Sarana pendukungnya	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
rincian	'09.01.07.02	Bangsai Pasca Panen Komoditas Bawang dan Sarana Pendukungnya	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
menu_kegiatan	'09.01.09	Renovasi Puskesmas dan Penyediaan Sarana pendukungnya	penugasan				
rincian	'09.01.09.01	Pembangunan puskesmas dan penyediaan sarana pendukungnya	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
sub_bidang	'09.02	Pangan - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)					
menu_kegiatan	'09.02.02	Rehabilitasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	penugasan				
rincian	'09.02.02.01	Rehabilitasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan lokasi koordinat pada usulan.

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATAT
							PROV
rincian	09.02.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung LPM	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan lokasi koordinat pada usulan.

TREEVIEW

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATAT
							PROV
bidang	`01	Pendidikan					
bidang	`02	Kesehatan dan KB					
bidang	`03	Konektivitas					
bidang	`04	Air Minum					
bidang	`05	Sanitasi					
bidang	`06	Perumahan dan Permukiman					
bidang	`08	Irigasi					
bidang	`09	Pangan Pertanian					
sub_bidang	`09.01	Pertanian - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)					
menu_kegiatan	`09.01.01	Pembangunan /Rehabilitasi Sumber-Sumber Air	penugasan				
rincian	`09.01.01.02	Pembangunan irigasi air tanah dalam	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
rincian	`09.01.01.04	Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
menu_kegiatan	`09.01.02	Jalan Pertanian	penugasan				
rincian	`09.01.02.01	Jalan Usaha Tani Hortikultura	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Perbaikan lokasi koordinat untuk usulan SARIAK ALAHAN TIGO
rincian	`09.01.02.02	Jalan Produksi Peternakan	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
menu_kegiatan	`09.01.05	Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	penugasan				

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATAT
							PROV
rincian	'09.01.05.02	Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
menu_kegiatan	'09.01.06	Pembangunan screen house modern pengembangan hortikultura	penugasan				
rincian	'09.01.06.01	Pembangunan screen house modern pengembangan hortikultura komoditas sayuran	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
menu_kegiatan	'09.01.07	Bangsai Pasca Panen Komoditas Hortikultura dan sarana pendukungnya	penugasan				
rincian	'09.01.07.01	Bangsai Pasca Panen Komoditas Cabai dan Sarana pendukungnya	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
rincian	'09.01.07.02	Bangsai Pasca Panen Komoditas Bawang dan Sarana Pendukungnya	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
menu_kegiatan	'09.01.09	Renovasi Puskesmas dan Penyediaan Sarana pendukungnya	penugasan				
rincian	'09.01.09.01	Pembangunan puskesmas dan penyediaan sarana pendukungnya	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia.
sub_bidang	'09.02	Pangan - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)					
menu_kegiatan	'09.02.02	Rehabilitasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	penugasan				
rincian	'09.02.02.01	Rehabilitasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan lokasi koordinat pada usulan.

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATAT
							PROV
rincian	09.02.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung LPM	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan lokasi koordinat pada usulan.



BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN VERIFIKASI USULAN KEGIATAN DAK FISIK KABUPATEN/KOTA
KELOMPOK PANGAN PERTANIAN DAN PANGAN AQUATIK
Nomor : 87 /VIII/BA/Eko-SDA/Bappeda-2024

Pada hari ini , tanggal **Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Ruang Rapat lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah diselenggarakan Verifikasi **Usulan Kegiatan DAK Fisik Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025**, yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Provinsi yang terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, Inspektorat dan OPD teknis Provinsi melalui aplikasi Krisna DAK.

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan :

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang No.01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
5. Surat Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2025.
6. Tanggapan dan saran dari seluruh Tim Verifikasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Tahun 2025 terhadap Usulan Kegiatan DAK Fisik dari Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Verifikasi Usulan DAK Fisik Tahun 2025 sebagaimana terlampir.
7. Usulan dan data pendukung pada menu Krisna DAK Tahun 2025 sepenuhnya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang mengusulkan, maka :

MENYEPAKATI

KESATU: Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui DAK Fisik Tahun 2025 dari **Kabupaten Kepulauan Mentawai** telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi.

KEDUA : Menyepakati hasil kesepakatan Verifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui DAK Fisik Tahun 2025 **dari Kabupaten Kepulauan Mentawai** diteruskan ke Pemerintah Pusat melalui surat Rekomendasi Gubernur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :

BAPPEDA PROV. SUMATERA BARAT


HENDRICK KASMADIHARJA, S.TP, M.Si

BAPPEDA KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI


SAHAD PARDAMAIAN, ST

DINAS PERKEBUNUNAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORT. PROV. SUMBAR


SERLY DERANTI, SP










DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROV. SUMATERA BARAT




ARLINDAWATI, M.Si

DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT











AZMI BOY, SP, MP



TREEVIEW

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATATAN
							PROV
bidang	`01	Pendidikan					
bidang	`02	Kesehatan dan KB					
bidang	`03	Konektivitas					
bidang	`10	Pangan Akuatik					
sub_bidang	`10.01	Pangan Akuatik - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)					
menu_kegiatan	`10.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	penugasan				
rincian	`10.01.05.03	Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan koordinat lokasi pada usulan Kecamatan SIPORA UTARA
rincian	`10.01.05.04	Sarana penangkapan ikan (alat penangkapan ikan dan/atau sarana pendukung penangkapan ikan dan/atau sarana keselamatan pelayaran) untuk perahu/kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan.
menu_kegiatan	`10.01.06	Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota)	penugasan				
rincian	`10.01.06.01	Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon/bak pendederan	penugasan		Meter Persegi	ready	 Usulan direkomendasikan.
rincian	`10.01.06.02	Pembangunan kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon/bak pendederan	penugasan		Meter Persegi	ready	 Usulan direkomendasikan.
rincian	`10.01.06.05	Penyediaan sarana dan peralatan produksi	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan.
menu_kegiatan	`10.01.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil	penugasan				
rincian	`10.01.07.04	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar / Komoditas Lokal	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan.
rincian	`10.01.07.06	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Laut (Kerapu, Bawal Bintang, Kakap, Teripang atau Lobster)	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan.
rincian	`10.01.07.07	Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan penambahan dokumen profil usaha Kecamatan SIKAKAP saat desk
rincian	`10.01.07.09	Pembangunan Prasarana Pembenuhan Ikan masyarakat (UPR/HSRT)	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan.
menu_kegiatan	`10.01.08	Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	penugasan				

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATATAN
							PROV
rincian	10.01.08.03	Rehabilitasi pabrik es atau Ice flake machine	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan.
rincian	10.01.08.04	Bedah Unit Pengolahan ikan skala mikro kecil	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan.

TREEVIEW

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATATAN
							PROV
bidang	`01	Pendidikan					
bidang	`02	Kesehatan dan KB					
bidang	`03	Konektivitas					
bidang	`10	Pangan Akuatik					
sub_bidang	`10.01	Pangan Akuatik - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)					
menu_kegiatan	`10.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	penugasan				
rincian	`10.01.05.03	Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan koordinat lokasi pada usulan Kecamatan SIPORA UTARA
rincian	`10.01.05.04	Sarana penangkapan ikan (alat penangkapan ikan dan/atau sarana pendukung penangkapan ikan dan/atau sarana keselamatan pelayaran) untuk perahu/kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan.
menu_kegiatan	`10.01.06	Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota)	penugasan				
rincian	`10.01.06.01	Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon/bak pendederan	penugasan		Meter Persegi	ready	 Usulan direkomendasikan.
rincian	`10.01.06.02	Pembangunan kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon/bak pendederan	penugasan		Meter Persegi	ready	 Usulan direkomendasikan.
rincian	`10.01.06.05	Penyediaan sarana dan peralatan produksi	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan.
menu_kegiatan	`10.01.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil	penugasan				
rincian	`10.01.07.04	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar / Komoditas Lokal	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan.
rincian	`10.01.07.06	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Laut (Kerapu, Bawal Bintang, Kakap, Teripang atau Lobster)	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan.
rincian	`10.01.07.07	Sarana dan Prasarana Budidaya Rumpuk Laut	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan penambahan dokumen profil usaha Kecamatan SIKAKAP saat desk
rincian	`10.01.07.09	Pembangunan Prasarana Pembenuhan Ikan masyarakat (UPR/HSRT)	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan.
menu_kegiatan	`10.01.08	Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	penugasan				

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATATAN
							PROV
rincian	`10.01.08.03	Rehabilitasi pabrik es atau Ice flake machine	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan.
rincian	`10.01.08.04	Bedah Unit Pengolahan ikan skala mikro kecil	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676
Padang

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN VERIFIKASI USULAN KEGIATAN DAK FISIK KABUPATEN/KOTA
KELOMPOK PANGAN PERTANIAN DAN PANGAN AQUATIK
Nomor : 89/VIII/BA/Eko-SDA/Bappeda-2024

Pada hari ini , tanggal **Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Ruang Rapat lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah diselenggarakan Verifikasi **Usulan Kegiatan DAK Fisik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025**, yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Provinsi yang terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, Inspektorat dan OPD teknis Provinsi melalui aplikasi Krisna DAK.

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan :

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang No.01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
5. Surat Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2025.
6. Tanggapan dan saran dari seluruh Tim Verifikasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Tahun 2025 terhadap Usulan Kegiatan DAK Fisik dari Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Verifikasi Usulan DAK Fisik Tahun 2025 sebagaimana terlampir.
7. Usulan dan data pendukung pada menu Krisna DAK Tahun 2025 sepenuhnya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang mengusulkan, maka :

MENYEPAKATI

KESATU: Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui DAK Fisik Tahun 2025 dari **Kabupaten Padang Pariaman** telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi.

KEDUA : Menyepakati hasil kesepakatan Verifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui DAK Fisik Tahun 2025 **dari Kabupaten Padang Pariaman** diteruskan ke Pemerintah Pusat melalui surat Rekomendasi Gubernur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :

BAPPEDA PROV. SUMATERA BARAT


HENDRICK KASMADIHARJA, S.TP, M.Si

BAPPEDA KABUPATEN PADANG
PARIAMAN


KRESNA HANDOYO, S.Pi

DINAS PERKEBUNUNAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORT. PROV. SUMBAR


SERLY DERANTI, SP















DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROV. SUMATERA BARAT












ARLINDAWATI, M.Si

DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
















AZMI BOY, SP, MP











TREEVIEW

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATATAN	
							PROV	KEMENDAGRI
bidang	01	Pendidikan						
bidang	02	Kesehatan dan KB						
bidang	03	Konektivitas						
bidang	05	Sanitasi						
bidang	08	Irigasi						
bidang	10	Pangan Akuatik						
sub_bidang	10.01	Pangan Akuatik - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)						
menu_kegiatan	10.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	penugasan					
rincian	10.01.05.03	Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
rincian	10.01.05.04	Sarana penangkapan ikan (alat penangkapan ikan dan/atau sarana pendukung penangkapan ikan dan/atau sarana keselamatan pelayaran) untuk perahu/kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
rincian	10.01.05.06	Sarana dan Prasarana Kampung Nelayan	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
menu_kegiatan	10.01.06	Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota)	penugasan					
rincian	10.01.06.01	Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon/bak pendederan	penugasan		Meter Persegi	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
rincian	10.01.06.02	Pembangunan kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon/bak pendederan	penugasan		Meter Persegi	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
rincian	10.01.06.06	Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
rincian	10.01.06.07	Rehabilitasi prasarana produksi unit pembenihan	penugasan		Meter Persegi	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
menu_kegiatan	10.01.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil	penugasan					

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATATAN	
							PROV	KEMENDAGRI
rincian	10.01.07.04	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar / Komoditas Lokal	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
rincian	10.01.07.09	Pembangunan Prasarana Pembelian Ikan masyarakat (UPR/HSRT)	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan. Perbaikan koordinat lokasi untuk usulan PATAMUAN.	
rincian	10.01.07.10	Jalan Produksi Kawasan Budidaya	penugasan		Meter lari	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
menu_kegiatan	10.01.08	Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	penugasan					
rincian	10.01.08.04	Bedah Unit Pengolahan ikan skala mikro kecil	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan. Perbaikan koordinat untuk usulan Sungai Limau.	
rincian	10.01.08.05	Pembangunan/Rehabilitasi bangunan pasar ikan	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	

TREEVIEW

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATATAN	
							PROV	KEMENDAGRI
bidang	01	Pendidikan						
bidang	02	Kesehatan dan KB						
bidang	03	Konektivitas						
bidang	05	Sanitasi						
bidang	08	Irigasi						
bidang	10	Pangan Akuatik						
sub_bidang	10.01	Pangan Akuatik - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)						
menu_kegiatan	10.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	penugasan					
rincian	10.01.05.03	Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
rincian	10.01.05.04	Sarana penangkapan ikan (alat penangkapan ikan dan/atau sarana pendukung penangkapan ikan dan/atau sarana keselamatan pelayaran) untuk perahu/kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
rincian	10.01.05.06	Sarana dan Prasarana Kampung Nelayan	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
menu_kegiatan	10.01.06	Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota)	penugasan					
rincian	10.01.06.01	Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon/bak pendederan	penugasan		Meter Persegi	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
rincian	10.01.06.02	Pembangunan kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon/bak pendederan	penugasan		Meter Persegi	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
rincian	10.01.06.06	Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
rincian	10.01.06.07	Rehabilitasi prasarana produksi unit pembenihan	penugasan		Meter Persegi	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
menu_kegiatan	10.01.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil	penugasan					

LEVEL	KODE	NOMENKLATUR	JENIS	VOLUME	SATUAN	STATUS	CATATAN	
							PROV	KEMENDAGRI
rincian	10.01.07.04	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar / Komoditas Lokal	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
rincian	10.01.07.09	Pembangunan Prasarana Pembenhnan Ikan masyarakat (UPR/HSRT)	penugasan		Paket	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan. Perbaikan koordinat lokasi untuk usulan PATAMUAN.	
rincian	10.01.07.10	Jalan Produksi Kawasan Budidaya	penugasan		Meter lari	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	
menu_kegiatan	10.01.08	Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	penugasan					
rincian	10.01.08.04	Bedah Unit Pengolahan ikan skala mikro kecil	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan. Perbaikan koordinat untuk usulan Sungai Limau.	
rincian	10.01.08.05	Pembangunan/Rehabilitasi bangunan pasar ikan	penugasan		Unit	ready	 Usulan direkomendasikan dengan catatan perbaikan keterangan (Ya/Tidak) dikarenakan permasalahan aplikasi KRISNA saat input usulan. Data dukung tersedia. Pemeringkatan belum dilakukan.	

BAB IV PENUTUP

Dari uraian laporan pelaksanaan kegiatan laporan diatas, dapat disampaikan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Proses penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah mengikuti kaidah dan aturan hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan yaitu Permendagri No. 86 Tahun 2017. Penyusunan Renja OPD di lingkup koordinasi bidang sumber daya alam dilaksanakan mulai dari penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah oleh OPD, pembahasan/verifikasi rancangan Renja OPD yang diikuti dengan pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Hasil pelaksanaan beberapa kegiatan ini menjadi masukan dalam penyempurnaan penyusunan Renja OPD dan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat.
2. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sedikit banyak berdampak besar terhadap perencanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024. Beberapa jenis pengalihan kewenangan baik dari kabupaten/kota ke Provinsi maupun dari Provinsi ke Nasional harus diiringi dengan kesiapan dan harmonisasi aturan perundangan yang menjadi dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan teknis program dan kegiatan. Keterbatasan aturan terutama dalam aspek keuangan berdampak pada minimnya anggaran Pemerintah Provinsi untuk mendanai sejumlah program dan kegiatan yang beralih kewenangannya dari kabupaten/kota ke provinsi, serta adanya gejolak perekonomian dunia yang banyak sekali mempengaruhi kehidupan dan perekonomian masyarakat, keadaan ini membuat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melihat program dan kegiatan yang betul-belum mendukung terlaksananya program unggulan dan visi misi Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung pencapaian target RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.
3. Keselarasan perencanaan program dan kegiatan tahunan mulai dari RKPD, KUA PPAS, hingga APBD menjadi suatu keharusan dalam perencanaan pembangunan daerah. Verifikasi dokumen perencanaan pembangunan daerah

4. lingkup koordinasi bidang sumber daya alam dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Biro Orhanisasi, Biro Administrasi Pembangunan, Inspektorat
5. Verifikasi usulan dana DAK fisik Kabupaten/kota tahun 2025 dilaksanakan agar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021, pengalokasian DAK Fisik dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.